

## **B.18. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian**

Sebagai salah satu fungsi dan peranan yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah maka berdasarkan urusan desentralisasi yang dikelola, urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian merupakan salah satu urusan wajib yang diselenggarakan Pemerintah Kota Medan selama tahun 2008.

### **1. Sub Urusan Sekretariat Daerah**

#### **a. Program dan Kegiatan**

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - 1.1. Penyediaan jasa surat menyurat.
  - 1.2. Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik.
  - 1.3. Penyediaan jaminan pemeliharaan kesehatan PNS
  - 1.4. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
  - 1.5. Penyediaan jasa administrasi keuangan
  - 1.6. Penyediaan jasa kebersihan kantor
  - 1.7. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
  - 1.8. Penyediaan alat tulis kantor
  - 1.9. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
  - 1.10. Penyediaan komponen Instalasi Listrik/ penerangan bangunan kantor
  - 1.11. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
  - 1.12. Penyediaan makanan dan minuman
  - 1.13. Pelayanan rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
  - 1.14. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran
  - 1.15. Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan alat komunikasi

- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  - 2.1. Pengadaan kendaraan dinas/operasional
  - 2.2. Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas
  - 2.3. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
  - 2.4. Pengadaan peralatan gedung kantor
  - 2.5. Pengadaan komputer dan perlengkapannya
  - 2.6. Pengadaan perlengkapan alat-alat komunikasi
  - 2.7. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
  - 2.8. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
  - 2.9. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
  - 2.10. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
  - 2.11. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
  - 2.12. Sewa mobil untuk Panwaslu dan Pilgubsu
  
- 3) Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
  - 3.1 Pengadaan sarana penyimpanan
  
- 4) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
  - 4.1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
  
- 5) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
  - 5.1 Pam Kantor Walikota / Rumah Dinas / Asset Daerah
  - 5.2 Pam Pejabat Pemko dan Kunjungan Pejabat Negara / Pusat
  - 5.3 Pam Insidentil
  - 5.4 Pam Penertiban
  - 5.5 Pam Wilayah Hukum Kota Medan
  - 5.6 Pemeliharaan CCTV untuk Pengamanan Kota
  - 5.7 Penyediaan izin senjata api
  
- 6) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah
  - 6.1. Rapat koordinasi unsur Muspida
  - 6.2. Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah

- 6.3. Penyediaan jaminan kesehatan KDH/Wakil KDH
- 6.4. Biaya rumah tangga Walikota
  
- 7) Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
  - 7.1. Fasilitasi kerjasama antar daerah/tamu Pemerintah Kota Medan
  
- 8) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
  - 8.1. Revaluasi/appraisal aset/barang daerah
  - 8.2. Peningkatan kesejahteraan pegawai
  - 8.3. Penelitian pelaksanaan BOT dengan pihak ketiga
  
- 9) Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
  - 9.1 Sertifikasi aset daerah
  
- 10) Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan hari-hari besar
  - 10.1 Kegiatan Dzikir dan doa serta hiburan menyambut tahun baru 2009
  - 10.2 Pelaksanaan Hari Olah Raga Nasional
  - 10.3 Pelaksanaan Hari Jadi Kota Medan
  - 10.4 Pelaksanaan Perayaan HUT RI
  - 10.5 Pelaksanaan Hari Kebangkitan Nasional
  - 10.6 Pelaksanaan Hari Jadi Propinsi SU
  - 10.7 Pelaksanaan halal bil halal Tepung Tawar Keberangkatan dan Pemulangan CJHI
  - 10.8 Pelaksanaan Peringatan Hari HKSAN
  - 10.9 Pelaksanaan peringatan Harganas
  - 10.10 Pelaksanaan Peringatan HUT Pramuka
  - 10.11 Pelaksanaan Open House dalam rangka Hari Raya
  - 10.12 Pelaksanaan Kegiatan Berbuka Puasa Bersama KDH / Wki KDH
  - 10.13 Pelaksanaan seremonial lainnya

- 11) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - 11.1 Penyediaan alat tulis kantor
  
- 12) Program Pengembangan Data Informasi
  - 12.1 Survey harga barang kebutuhan Pemko Medan
  
- 13) Program Peningkatan Ketahanan Pangan
  - 13.1 Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah
  
- 14) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  - 14.1 Pengadaan meubeleur
  
- 15) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
  - 15.1 Penyusunan standard satuan harga
  
- 16) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
  - 16.1 Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA
  
- 17) Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar
  - 17.1 Koordinasi perencanaan penanganan pusat - pusat pertumbuhan ekonomi
  
- 18) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
  - 18.1. Pembuatan dan sosialisasi Ranperda tentang kecamatan dan kelurahan.
  - 18.2. Peningkatan kapasitas kerjasama antara kecamatan dan kelurahan.
  
- 19) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
  - 19.1 Penyusunan Renja

19.2 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

20) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

20.1. Pembinaan kecamatan terbaik untuk penilaian Tingkat Provinsi Sumatera Utara.

21) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

21.1. Pemberdayaan kecamatan dan kelurahan untuk perlombaan tingkat Kota Medan.

21.2. Pawai Pembangunan mobil hias dan pawai berjalan kaki dalam rangka penyambutan HUT RI.

21.3. Pemantauan dan evaluasi kinerja Camat dan Lurah se-Kota Medan.

21.4. Studi komparatif penyusunan sistem informasi publik di kecamatan dan kelurahan dengan pedoman standar pelayanan minimal untuk Camat dan Lurah

22) Program Penataan Daerah Otonomi Baru

22.1. Fasilitasi penyiapan data dan informasi pendukung proses pemekaran daerah.

22.2. Kajian pemekaran wilayah kecamatan/kelurahan Kota Medan.

23) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

23.1. Pengadaan kendaraan dinas/operasional.

23.2. Pengadaan Meubeleur

24) Program Upaya Kesehatan Sekolah

24.1. Fasilitasi Operasional Sekretariat Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Kota Medan

- 25) Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
  - 25.1. Pendataan penyandang cacat dan penyakit kejiwaan
  - 25.2. Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma.
  
- 26) Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo
  - 26.1. Pembangunan sarana dan prasarana Panti Asuhan/Jompo
  - 26.2. Peningkatan ketrampilan tenaga Pelatih dan pendidik.
  - 26.3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
  
- 27) Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PNS termasuk HIV/AIDS.
  - 27.1. Penyuluhan Bahaya Narkoba
  - 27.2. Penyuluhan Bahaya HIV/AIDS
  - 27.3. Sosialisasi Bahaya Narkoba dan HIV/ AIDS melalui leaflet/brosur/selebaran
  - 27.4. Fasilitasi operasional Badan Narkotika Kota dan penanggulangan AIDS Kota Medan
  
- 28) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
  - 28.1. Pelayanan pemeliharaan kesehatan
  - 28.2. Pendidikan dan pelatihan perawatan kesehatan
  - 28.3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
  - 28.4. Operasional lembaga Lansia Indonesia (LLI) Kota Medan
  
- 29) Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
  - 29.1. Penyusunan Analisa Standar Belanja.
  - 29.2. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.
  - 29.3. Penyusunan standar dokumen lelang, standar dokumen kontrak, dan standar dokumen HPS Jasa Konstruksi dan Non Konstruksi.

- 30) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan  
30.1. Perencanaan rehabilitasi/ pemeliharaan jalan.
- 31) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH  
31.1. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH.
- 32) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi  
32.1. Penyusunan system informasi terhadap layanan publik.
- 33) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan  
33.1. Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan.
- 34) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase  
34.1. Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan drainase gorong-gorong.
- 35) Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi  
35.1. Pemberdayaan pengguna jasa konstruksi (instansi pemerintah, orang perseorangan, badan usaha).
- 36) Program Pengawasan Jasa Konstruksi  
36.1. Pengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi
- 37) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata  
37.1. Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri
- 38) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah  
38.1. Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri.

- 39) Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
- 39.1. Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik.
  - 39.2. Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana publik.
- 40) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 40.1. Penyediaan jasa surat menyurat
  - 40.2. Penyediaan alat tulis kantor
  - 40.3. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
  - 40.4. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
  - 40.5. Penyediaan makan dan minum
  - 40.6. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran
- 41) Program Hubungan Luar Negeri dan *Sister City*
- 41.1. Fasilitasi kerjasama luar negeri .
- 42) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
- 42.1. Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan.
  - 42.2. Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan.
  - 42.3. Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan.
  - 42.4. Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi, dan keserasian antar Peraturan Perundang-undangan Daerah.
- 43) Program Perlindungan Hukum dan Penegakan HAM
- 43.1. Advokasi Hukum dan tindakan-tindakan hukum untuk kepentingan Pemko Medan.
  - 43.2. Koordinasi kerjasama permasalahan hukum yang dihadapi Pemko

- 44) Program Pelayanan Administrasi Kantor
  - 44.1. Penyediaan alat tulis kantor
  - 44.2. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
  - 44.3. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
  
- 45) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  - 45.1. Pengadaan komputer dan perlengkapannya
  
- 46) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
  - 46.1. Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
  - 46.2. Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
  - 46.3. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD 2008
  - 46.4. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD 2008
  - 46.5. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2007
  - 46.6. Program Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
  - 46.7. Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah
  - 46.8. Aplikasi Program Komputerisasi Belanja Pegawai
  - 46.9. Operasional Sekretariat Tim Anggaran
  - 46.10. Pembenahan dan Penataan Dokumen Keuangan
  - 46.11. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2009
  
- 47) Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
  - 47.1. Pendataan dan penataan Dokumen/ Arsip Daerah

- 48) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelo-laan Keuangan Kabupaten/Kota
  - 48.1. Evaluasi, Verifikasi dan Pengesahan DPA
  
- 49) Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
  - 49.1. Penyusunan Ranperda Penyertaan Modal
  - 49.2. Penyusunan Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah
  - 49.3. Penyusunan Ranperda Pengelolaan Barang Daerah
  - 49.4. Workshop Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai Daerah
  
- 50) Program Pelayanan Administrasi Kantor
  - 50.1. Penyediaan alat tulis kantor
  - 50.2. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
  
- 51) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  - 51.1. Pengadaan komputer dan perlengkapannya
  
- 52) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
  - 52.1. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
  - 52.2. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
  
- 53) Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
  - 53.1. Sosialisasi UU No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
  - 53.2. Sosialisasi UU No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
  - 53.3. Sosialisasi UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
  
- 54. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
  - 54.1. Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT

- 54.2. Pelatihan program responsif gender
  
- 55. Program penguatan kelembagaan pengarus-utamaan gender dan anak
  - 55.1. Pencetakan buku peraturan perundang-undangan
  
- 56. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan
  - 56.1. Seminar penghapusan diskriminasi dan Kekerasan terhadap perempuan
  - 56.2. Penyuluhan peran perempuan menuju Keselarasan dan keadilan gender
  - 56.1. Pembinaan gerakan sayang ibu
  
- 57. Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari – Hari Besar
  - 57.1. Pelaksanaan Safari Ramadhan 1429 H Kota Medan
  - 57.2. Pemberian Paket Ramadhan kepada Mesjid dan Musholla Kota Medan tahun 1429 H
  - 57.3. Pemberangkatan TPHD dan TKHD Kota Medan tahun 1429 H
  - 57.4. Penyelenggaraan MTQ Kota Medan tahun 2008
  - 57.5. Pelaksanaan manasik akbar jemaah haji Kota Medan tahun 1429 H tahun 2008
  - 57.6. Penyelenggaraan Festival Nasyid Kota Medan tahun 2008
  - 57.7. Pemberdayaan LPTQ Kota Medan tahun 2008
  - 57.8. Pelaksanaan Khataman Al-Quran anak-anak se-Kota Medan tahun 1429 H
  - 57.9. Operasional pembinaan kegiatan keagamaan, pendidikan, kepemudaan, dan keolahragaan
  
- 60) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - 60.1. Penyediaan jasa surat menyurat
  - 60.2. Penyediaan alat tulis kantor

- 61) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  - 61.1. Pengadaan meubeleur
  - 61.2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
  
- 62) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah
  - 62.1. Penyediaan Penyusunan Konsep Pidato KDH
  - 62.2. Penyediaan Pres Release
  - 62.3. Penyediaan Bacaan dari Kliping surat kabar, majalah dan tabloid
  - 62.4. Peliputan kegiatan KDH dan Wakil KDH ke lapangan
- 63) Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
  - 63.1. Konsultasi rencana bidang kehumasyan antara Kabupaten/Kota
  
- 64) Program Kerjasama Informasi dengan mas media
  - 64.1. Penyebarluasan Informasi melalui media cetak
  - 64.2. Penyebarluasan informasi melalui media elektronik (Radio dan Televisi)

## **b. Pencapaian Program dan Kegiatan**

### **1. Urusan Umum**

Pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Bagian Umum selama TA 2008 menghasilkan *out put* (keluaran) sebagai berikut :

- 1) Pelayanan administrasi perkantoran :
  - Terlaksananya kegiatan pelayanan kepada masyarakat melalui jasa surat menyurat dan pelayanan administrasi/Tata Usaha kepada pimpinan.
  - Terpenuhinya rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar Daerah begitu juga rapat – rapat kordinasi yang dilaksanakan oleh Walikota Medan.
  - Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor seperti penyediaan ATK, pemenuhan peralatan dan perlengkapan kantor, pemeliharaan kendaraan dinas, terlaksananya pembayaran air, telepon dan listrik kantor di lingkungan Pemko Medan.

- 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :
- Untuk tahun anggaran 2008 telah dilaksanakan pengadaan kendaraan dinas operasional sebanyak 21 unit, meja kerja 46 unit, kursi kerja 110 Unit, Komputer PC/Note book 7 unit, AC 9 unit, Battery HT 300 unit, filling kabinet 15 unit, printer 1 unit, dispencer/peralatan minum 5 unit, lemari sorong 1 unit, lemari arsip 3 unit, mesin foto copy 1 unit, mesin penghancur kertas 1 unit, mesin hitung 16 digit 2 unit.
- 3) Bidang Peningkatan disiplin aparatur :
- Terlaksananya pengadaan pakaian untuk petugas protokol, sehingga petugas protokol dalam melaksanakan tugasnya memiliki identitas tersendiri dilapangan.
- 4) Bidang peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan :
- Bahwa dalam T.A.2008 Pemerintah Kota Medan telah melaksanakan pengamanan Kantor Walikota Medan baik yang bersifat insidentil maupun rutinitas, begitu juga pengamanan rumah jabatan Walikota Medan, rumah kediaman pribadi Walikota dan Wakil Walikota Medan, begitu juga pengamanan para pejabat pemerintahan kota Medan .
  - Di samping hal tersebut diatas, peningkatan keamanan juga dilaksanakan oleh pihak aparat Kepolisian berkoordinasi dengan Sat Pol PP, Dishub, BPP, baik ditingkat kecamatan, kelurahan atas pelanggaran peraturan dan ketentuan yang mengganggu ketertiban umum seperti penertiban Pedagang Kaki Lima, PSK dan lain sebagainya.
- 5) Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan hari – hari besar
- Terlaksananya kegiatan upacara hari-hari besar yang diperingati secara nasional seperti peringatan HUT Proklamasi, Harkitnas, dan lain-lain sebagainya, begitu juga peringatan keagamaan yang dimaksudkan sebagai salah satu wujud pembinaan mental dan spiritual PNS dan Masyarakat Kota Medan.

6) Bidang Peningkatan Kesejahteraan Pegawai

- Terlaksananya pemberian Tunjangan dalam menghadapi hari raya dan Natal bagi PNS, pensiunan dan tenaga swakelola di lingkungan Pemko Medan, sehingga mereka dapat terbantu dalam merayakan hari keagamaan tersebut.

**2. Sub Bina Perekonomian**

Pelaksanaan program dan kegiatan sub urusan bina perekonomian selama tahun 2008, mengacu kepada RKA-SKPD-/DPA-SKPD yang ditetapkan, serta prinsip-prinsip dayaguna dan hasilguna dari implementasi pelaksanaannya, sekaligus pertimbangan kemampuan keuangan daerah. Untuk implementasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan bina perekonomian selama tahun 2008, didukung oleh alokasi anggaran belanja daerah :

- Belanja Langsung sebesar Rp.700.000.000,-

Sesuai dengan prinsip-prinsip efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan yang diselenggarakan, realisasi belanja daerah per 31 Desember 2008 sebesar Rp.297.027.500,-

Implementasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran belanja langsung sub urusan bina perekonomian, menghasilkan *output* (keluaran) sebagai berikut :

- 1) Tersusunnya standard satuan harga tahunan dan biaya revisi tahun anggaran 2008 usul dari dinas-dinas dan instansi terkait.
- 2) Tersusunnya data statistik hasil survey harga barang kebutuhan Pemko Medan 2009 melalui kerjasama dengan BPS Kota Medan.
- 3) Tersedianya Penyediaan alat tulis kantor (ATK).

Penyelenggaraan sub urusan bagian bina perekonomian selama tahun 2008 menghasilkan manfaat dan dampak antara lain :

- a. Tersedianya pedoman harga bagi pemerintah Kota Medan dalam menyusun rencana kerja masing-masing SKPD.

- b. Tersedianya informasi tentang perkembangan harga dan stok barang kebutuhan pokok di Kota Medan.
- c. Meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan pengawasan pemakaian air bawah tanah.

### 3. Sub Urusan Tata Pemerintahan

Pelaksanaan program dan kegiatan sub urusan tata pemerintahan selama tahun 2008, mengacu kepada RKA-SKPD-/DPA-SKPD yang ditetapkan, serta prinsip-prinsip dayaguna dan hasilguna dari implementasi pelaksanaannya, sekaligus pertimbangan kemampuan keuangan daerah. Untuk implementasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan tata pemerintahan selama tahun 2008, didukung oleh alokasi anggaran belanja daerah.

- Belanja Langsung sebesar Rp1.650.000.000,-
- Total Belanja Daerah sebesar Rp1.650.000.000,-

Sesuai dengan prinsip-prinsip efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan yang diselenggarakan, realisasi belanja daerah per 31 Desember 2008 sebesar Rp.75.664.916,-

Implementasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran belanja langsung sub urusan tata pemerintahan, menghasilkan *output* (keluaran) sebagai berikut :

- 1) Pawai pembangunan mobil hias dan pawai berjalan kaki dalam rangka penyambutan HUT RI, yang diikuti oleh berbagai instansi baik swasta maupun pemerintah.
- 2) Pemantauan dan evaluasi kinerja Camat dan Lurah se-Kota Medan, yang dilakukan oleh 3 tim dari Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Medan selama 4 (empat) bulan sejak Bulan September sampai Desember 2008.

Penyelenggaraan Sub Urusan Tata Pemerintahan selama tahun 2008 menghasilkan manfaat dan dampak antara lain :

- Memeriahkan perayaan HUT RI ke-63
- Tersedianya laporan tim pemantauan terhadap kinerja para camat dan lurah sebagai bahan evaluasi kinerja.
- Kesesuaian struktur jabatan menggunakan PP Nomor 84 Tahun 2000 menjadi 75% pada tahun 2008
- Peningkatan tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait menjadi 75% tahun 2008

#### **4. Sub Urusan Kesejahteraan**

Pelaksanaan program dan kegiatan urusan Kesejahteraan selama tahun 2008, mengacu kepada RKA-SKPD/DPA-SKPD yang ditetapkan, serta prinsip-prinsip daya guna dan hasil guna dari implementasi pelaksanaannya, sekaligus pertimbangan kemampuan keuangan daerah.

Untuk Implementasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan kesejahteraan selama tahun 2008, didukung oleh alokasi Anggaran belanja daerah, yang terdiri dari :

- Belanja langsung Rp. 1.000.000.000,-
- Total Belanja Daerah Rp. 1.000.000.000,-

Sesuai dengan prinsip-prinsip efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan yang diselenggarakan, realisasi belanja daerah per-31 Desember 2008 sebesar Rp.112.740.000,-

Implementasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran belanja langsung SKPD urusan kesejahteraan, menghasilkan keluaran (output) sbb:

- 1) Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma.  
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan ini menghasilkan keluaran (Output) pokok yaitu :

- Terlaksananya pendataan penyandang cacat di Kota Medan. Pendataan ini dimaksudkan untuk mengetahui jumlah kelompok Usaha Penyandang Cacat (KUPC) di Kota Medan.

2) Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PNS termasuk HIV/AIDS

- Terlaksananya pelaksanaan cetak brosur/ stiker tentang bahaya Narkoba dan bahaya HIV/AIDS di Kota Medan. Pencetakan brosur dan stiker ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang bahaya Narkoba dan bahaya HIV/AIDS kepada masyarakat di Kota Medan.

Penyelenggaraan urusan Kesejahteraan selama tahun 2008 menghasilkan manfaat dan dampak antara lain :

- 1) Meningkatnya dan terdatanya kelompok Usaha Penyandang Cacat (KUPC) di Kota Medan = 50%.
- 2) Meningkatnya akses informasi masyarakat tentang bahaya Narkoba dan HIV/AIDS di Kota Medan = 25%

##### **5. Sub Urusan Bina Program**

Pelaksanaan program dan kegiatan Bagian Bina Program Sekretariat Daerah Kota Medan selama tahun 2008, mengacu kepada RKA-SKPD/DPA SKPD yang ditetapkan, serta prinsip-prinsip dayaguna dan hasil guna dari implementasi pelaksanaannya, sekaligus pertimbangan kemampuan keuangan daerah. Untuk implemen-tasi pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2008 didukung oleh alokasi anggaran belanja daerah, yang terdiri dari :

- Belanja Langsung sebesar Rp.2.050.000.000,-
- Total Belanja Daerah SKPD Rp.2.050.000.000,-

Sesuai dengan prinsip-prinsip efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan yang diselenggarakan, realisasi belanja daerah per 31 Desember 2008 sebesar Rp.1.286.463.100,-

Implementasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran belanja langsung SKPD Bagian Bina Program Sekretariat Daerah Kota Medan, menghasilkan keluaran (*output*) sebagai berikut :

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan ini menghasilkan keluaran (*output*) pokok antara lain :

- Tersedianya computer dan mesin tik yang layak pakai.
- Tersedianya ATK .
- Tersedianya map, lembar disposisi, formulir IUJK, amplop berkop, dan kop surat Walikota Medan, Sekretriati Daerah, dan Bagian Bina Program.
- Tersedianya buku peraturan perundang-undangan.
- Tersedianya makan dan minum rapat.
- Terlaksananya koordinasi dan konsultasi langsung ke instansi terkait di luar Daerah.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan ini menghasilkan keluaran (*output*) pokok antara lain :

- Tersedianya kursi/meja gedung kantor dan *software* berbasis IT.

3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan ini menghasilkan keluaran (*output*) pokok antara lain :

- Tersusunnya rencana kerja tahun 2009.

4) Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan ini menghasilkan keluaran (*output*) pokok antara lain :

- Tersusunnya Dokumen Analisa Standar Belanja Pemerintah Kota Medan.
- Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yang diterbitkan.

- Tersusunnya buku standar dokumen lelang, standar dokumen kontrak, dan standar dokumen HPS Jasa Konstruksi dan Non Konstruksi.

5) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan ini menghasilkan keluaran (*output*) pokok antara lain :

- Tersedianya buku petunjuk teknis pemilihan penyedia pengadaan barang/jasa

6) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan ini menghasilkan keluaran (*output*) pokok antara lain :

- Jumlah peserta yang ikut sosialisasi.

7) Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan ini menghasilkan keluaran (*output*) pokok antara lain :

- Jumlah pegawai yang tersosialisasi.

8) Program Pengawasan Jasa Konstruksi

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan ini menghasilkan keluaran (*output*) pokok antara lain :

- Pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi

## **6. Sub Urusan Hubungan Antar Kota Dan Daerah**

Pelaksanaan program dan kegiatan sub urusan hubungan antar kota dan antar daerah Setda Kota Medan selama tahun 2008, mengacu kepada RKA-SKPD-/DPA-SKPD yang ditetapkan, serta prinsip-prinsip dayaguna dan hasilguna dari implementasi pelaksanaannya, sekaligus pertimbangan kemampuan keuangan daerah. Untuk implementasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan hubungan antar kota dan antar daerah selama tahun 2008, didukung oleh alokasi anggaran belanja daerah.

- Belanja Langsung sebesar Rp 2.300.000.000,-
- Total Belanja daerah SKPD Rp 2.300.000.000,-

Sesuai dengan prinsip efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan yang diselenggarakan, realisasi belanja daerah per 31 Desember 2008 sebesar Rp. 947.663.745,-

Implementasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran belanja langsung sub urusan hubungan antar kota dan antar daerah, menghasilkan *output* (keluaran) sebagai berikut :

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat  
Tersedianya Jasa Surat Menyurat. Sebanyak 5 (lima) orang pegawai/staf pengelola surat menyurat selama 1 Tahun.
- Penyediaan Alat Tulis Kantor  
Tersedianya Alat Tulis Kantor.
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.  
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan.  
Realisasi 98,65%
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor, terdiri dari :
  - Air Conditioner
  - Kalkulator
  - Filling Kabinet
  - Komputer Note Book
  - Flash Disk
  - Meja Komputer
  - Kursi Putar
  - Kursi Kerja Pegawai
  - Lemari Arsip / Rak Buku
- Penyediaan Makanan dan Minuman  
Tersedianya makanan dan minuman, khususnya minuman pegawai dan tamu yang berkunjung.

- Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran

Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Kantor Sister City sehingga terciptanya kantor yang bersih, nyaman dan representatif.

## 2) Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

- Fasilitasi / Pembentukan Kerjasama Antar Daerah dalam Penyediaan Pelayanan Publik.

Terlaksananya Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Antara Daerah dalam Penyediaan Pelayanan Publik, antara lain: Pengiriman Delegasi Kota Medan untuk mengikuti Event atau Kegiatan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia Tingkat Pusat dan Komisariat Wilayah, yaitu: Rapat Kerja Nasional (1 kali), Rapat Kerja, Rapat Koordinasi (2 kali).

## 3) Program Hubungan Luar Negeri dan Sister City

- Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri

Terlaksananya Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri di Sister City, dengan pengiriman Pelajar Kota Medan sebanyak 13 orang mengikuti Program Perkemahan Kebangsaan KRS dan NGO di Pulau Pinang, Malaysia.

– Pengiriman Delegasi Kota Medan sebanyak 18 (delapan belas) orang ke Kota Chengdu, China

– Pengiriman Delegasi Kota Medan sebanyak 19 (sembilan belas) orang ke Kota Gwangju

– Pengiriman Pelajar Kota Medan sebanyak 8 (delapan) orang mengikuti Program Cabaran Mutiara di Pulau Pinang, Malaysia

– Pengiriman Pelajar Kota Medan sebanyak 10 (sepuluh) orang ke Kota Ichikawa, Jepang mengikuti Program Pertukaran Pelajar

– Pengiriman Delegasi Kota Medan sebanyak 2 (dua) orang ke Kota Pulau Pinang, Malaysia.

Penyelenggaraan sub urusan antar kota dan daerah selama tahun 2008 menghasilkan manfaat dan dampak antara lain :

- Meningkatnya kerjasama dengan daerah lain (dalam dan luar negeri) yang ditandai dengan berhasilnya ditandatangani 5 MOU.
- Membaiknya image dan citra positif Kota Medan sebagai Kota yang Aman, Terbuka dan Bersahabat untuk Kerjasama dan Investasi.
- Meningkatnya fasilitasi kerjasama, baik di Dalam Negeri dan Luar Negeri dalam penyediaan sarana dan prasarana publik.

### **7. Sub Urusan Hukum**

Pelaksanaan program dan kegiatan urusan Bagian Hukum selama tahun 2008, mengacu kepada RKA-SKPD/DPA-SKPD yang ditetapkan, serta prinsip-prinsip dayaguna dan hasilguna dari implementasi pelaksanaannya, sekaligus pertimbangan kemampuan keuangan daerah. Implementasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran belanja langsung SKPD Bagian Hukum didukung alokasi anggaran Tahun 2008 sebagai berikut:

- |                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| - Belanja Langsung sebesar  | Rp. 1.033.748.388,-   |
| - Total Belanja Daerah SKPD | Rp. 1.033.748.388,-,- |

Sesuai dengan prinsip-prinsip efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan yang diselenggarakan, realisasi belanja daerah per 31 Desember 2008 sebesar Rp.1.033.748.388,-.

Implementasi pelaksanaan program, kegiatan dan belanja langsung SKPD sub urusan Hukum selama Tahun 2008 menghasilkan output (keluaran) sebagai berikut :

- 1) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  - Pengadaan Komputer dan perlengkapannya. Kegiatan ini diperuntukan untuk pembelian 1 (satu) buah Laptop.

## 2) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

- Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan. Kegiatan ini adalah untuk mendukung kegiatan revisi dan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah yang sesuai untuk kebutuhan Pemerintah Kota Medan. Dalam Tahun 2008 jumlah draft Ranperda yang diajukan ke DPRD Kota Medan untuk dilakukan pembahasannya sebanyak 10 Draft Ranperda, sedangkan yang di sah-kan menjadi Perda sebanyak 2 (dua) Draft Perda, sisanya sebanyak 8 (delapan) Draft Ranperda masih dalam proses pembahasan.
- Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan  
Kegiatan ini untuk mendukung pelaksanaan eksaminasi terhadap berbagai produk hukum yang akan diterbitkan oleh Pemerintah Kota Medan. Kegiatan ini adalah melakukan pengujian, analisa terhadap produk-produk hukum yang akan diterbitkan apakah telah sesuai dan relevan untuk kebutuhan Pemerintah Kota Medan. Hal ini dilakukan untuk menghindari sampai terjadi produk-produk hukum yang diterbitkan menimbulkan permasalahan dikemudian hari. Jumlah produk hukum yang dieksaminasi oleh Bagian Hukum sebanyak 66 jenis.

## 3) Program Perlindungan Hukum dan Penegakan HAM.

- Advokasi Hukum dan Tindakan-tindakan Hukum untuk kepentingan Pemko Medan.  
Kegiatan ini dilaksanakan untuk menyelesaikan permasalahan hukum dan kasus hukum yang dihadapi Pemerintah Kota Medan. Permasalahan-permasalahan hukum/kasus-kasus hukum yang dihadapi Pemerintah Kota Medan berupa kasus Tata Usaha Negara (TUN) dan Perdata berjumlah 30 kasus. Sampai dengan Desember 2008 kasus-kasus tersebut masih dalam proses penyelesaian di Pengadilan.
- Koordinasi kerjasama permasalahan-permasalahan hukum yang dihadapi Pemerintah Kota Medan

Kegiatan ini adalah melaksanakan pendampingan terhadap aparatur Pemerintah Kota Medan yang diperiksa oleh Kepolisian dan Kejaksaan. Bagian Hukum dalam kegiatan ini melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Kasus-kasus pidana yang ditangani sampai dengan Desember 2008 sebanyak 57 kasus.

Penyelenggaraan Sub Urusan Hukum selama tahun 2008 menghasilkan manfaat dan dampak antara lain :

- Tersedianya produk peraturan perundang-undangan sebanyak 5 Perda tahun 2008
- Ditindaklanjutinya Keputusan Walikota menjadi 100% tahun 2008

#### **8. Sub Urusan Keuangan Daerah**

Pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran urusan pemerintahan umum, di bidang urusan pengelolaan keuangan daerah selama tahun 2008 menghasilkan output (keluaran) sebagai berikut :

- 1) Tersusunnya pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2007 berupa Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Medan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, yang bertujuan untuk menyampaikan dan menginformasikan pelaksanaan APBD dan pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Medan kepada stakeholder.
- 2) Tersusunnya rancangan APBD tahun anggaran 2008 dan perubahan APBD tahun anggaran 2008 berupa Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Medan yang dipergunakan sebagai pedoman pelaksanaan keuangan dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah
- 3) Tersusunnya laporan keuangan semester pertama tahun anggaran 2008 sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.

- 4) Terbenahinya dan tertatanya dokumen dan arsip bagian keuangan, dan penempatannya pada kantor Arsip Daerah.
- 5) Terlaksananya bimbingan teknis terhadap 40 PNS pengelola keuangan, yang dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
- 6) Tersedianya 80 buku pedoman pengelolaan keuangan daerah yang terdistribusi kepada seluruh SKPD di jajaran Pemko Medan.

Penyelenggaraan Sub Urusan Keuangan Daerah selama tahun 2008 menghasilkan manfaat dan dampak antara lain :

- Peningkatan serapan dana perimbangan menjadi 104% tahun 2008
- Peningkatan alokasi belanja publik pada APBD menjadi 51,8% tahun 2008
- Peningkatan proporsi belanja langsung menjadi 51,81% tahun 2008
- Peningkatan rasio belanja terhadap anggaran belanja menjadi 75,62% tahun 2008
- Peningkatan rasio realisasi APBD 2007 terhadap potensi PAD menjadi 104% tahun 2008

#### **9. Sub Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak**

Pelaksanaan program dan kegiatan urusan pemberdayaan perempuan selama tahun 2008, mengacu kepada RKA-SKPD/DPA-SKPD yang ditetapkan, serta prinsip-prinsip dayaguna dan hasilguna dari implementasi pelaksanaannya, sekaligus pertimbangan kemampuan keuangan daerah. Untuk implementasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak selama tahun 2008, didukung oleh alokasi anggaran belanja daerah, terdiri dari:

- Belanja Langsung sebesar Rp.440.684.038,-
- Total Belanja Daerah SKPD Rp.440.684.038,-

Sesuai dengan prinsip efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan yang diselenggarakan, realisasi belanja daerah per 31 Desember 2008 sebesar Rp. 440.684.038,-.

Implementasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran belanja langsung sub urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, menghasilkan *output* (keluaran) sebagai berikut :

- 1) Pemberdayaan perempuan dalam ekonomi melalui peningkatan kemampuan pengembangan usaha, keterampilan kerja dan perlindungan serta kesejahteraan kerja.
- 2) Pemberdayaan perempuan dalam kesehatan status gizi dan Keluarga Berencana.
- 3) Pemberdayaan Perempuan dalam politik, hukum dan hak azasi manusia.
- 4) Optimalisasi berbagai kebijakan dan program dalam rangka mensosialisasikan Kesetaraan Gender, dalam lingkungan lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif.
- 5) Pemantapan kelembagaan perempuan dan Pusat Studi Wanita (PSW) atau LSM perempuan dalam rangka peningkatan SDM dan pengembangan masalah-masalah gender.
- 6) Peningkatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG).
- 7) Peningkatan peran, kemandirian dan perlindungan perempuan.
- 8) Peningkatan peran serta Tokoh Agama, Adat dan Masyarakat dalam memasyarakatkan perempuan dan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG).
- 9) Peningkatan peran serta Media Massa dan Swasta.
- 10) Peningkatan Koordinasi Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Pengembangan kerjasama dengan instansi pemerintah, Perguruan Tinggi dan lembaga lainnya.
- 11) Terlaksananya sosialisasi:
  - UU No. 23/2004
  - UU No. 21/2007
  - UU NO. 23/2002
  - Pelatihan paralegal

- 12) Tersosialisasikannya, terlatihnya dan terbina-nya aparat pemerintah, masyarakat, penegak hukum dan paralegal tentang kesetaraan dan keadilan gender.

Penyelenggaraan Sub Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selama tahun 2008 menghasilkan manfaat dan dampak antara lain :

- Peningkatan angka melek huruf perempuan usia 15 tahun ke atas menjadi 70,30% tahun 2008

#### **10. Sub Urusan Agama Dan Pendidikan**

Pelaksanaan program dan kegiatan sub urusan agama dan pendidikan Setda Kota Medan selama tahun 2008, mengacu kepada RKA-SKPD-/DPA-SKPD yang ditetapkan, serta prinsip-prinsip dayaguna dan hasilguna dari implementasi pelaksanaannya, sekaligus pertimbangan kemampuan keuangan daerah. Untuk implementasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan agama dan pendidikan selama tahun 2009, didukung oleh alokasi anggaran belanja daerah.

- Belanja Langsung sebesar Rp.4.500.000.000,-.
- Total Belanja Daerah SKPD Rp. 4.500.000.000,-.

Sesuai dengan prinsip efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan yang diselenggarakan, realisasi belanja daerah per 31 Desember 2008 sebesar Rp. 4.500.000.000,-.

Implementasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran belanja langsung sub urusan agama dan pendidikan, menghasilkan *output* (keluaran) sebagai berikut :

- 1) Terlaksananya Safari Ramadhan di 21 Kecamatan yang ada di Kota Medan oleh Tim Safari Ramadhan
  - Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkat-kan hubungan sosial keagamaan antara Pemerintah Kota Medan dengan masyarakat dan meningkatkan aktifitas kegiatan di setiap Mesjid dan Musholla dalam mengisi malam-malam Ramadhan.
  
- 2) Terlaksananya Pemberian Paket Ramadhan 1429 H kepada 991 Mesjid dan 694 Musholla se-Kota Medan
  - Kegiatan ini dimaksudkan untuk memenuhi ketersediaan minuman di setiap Mesjid dan Musholla sehingga mendorong warga untuk mengisi malam-malam Ramadhan terutama pengadaan ceramah agama dan melakukan tadarusan baca Al-Qur'an selama bulan puasa ramadhan.
  
- 3) Terlaksananya Penyelenggaraan MTQ ke 41 Tingkat Kota Medan Tahun 2008 di Kecamatan Medan Marelan
  - Kegiatan ini melahirkan 30 Juara dari 30 Cabang/Golongan yang diperlombakan, dimaksudkan untuk meningkatkan minat baca kitab suci Al-Qur'an dan pengamalan isi yang terkandung di dalamnya.
  
- 4) Terlaksananya Manasik Akbar calon Jemaah Haji Kota Medan bertempat di Asrama Haji Medan oleh Tim Manasik Akbar
  - Kegiatan ini dimaksudkan untuk mening-katkan kualitas pelaksanaan ibadah Haji.
  
- 5) Terlaksananya Pembinaan Mental Pegawai yang dilaksanakan di 4 tempat oleh koordi-nator yang ditunjuk
  - Kegiatan ini dimaksudkan untuk mening-katkan pengamalan agama dan moral di kalangan pegawai.
  
- 6) Terlaksananya Penyelenggaraan Festival Nasyid ke 28 Kota Medan.

- Kegiatan ini melahirkan 4 Group terbaik, dimaksudkan untuk meningkatkan intensitas dakwah melalui seni Nasyid.
- 7) Terlaksananya kegiatan Khataman Alqur'an Anak-Anak se-Kota Medan Tahun 1429 H/2008 M sebanyak 420 orang yang tersebar di 21 Kecamatan.
    - Kegiatan ini dipusatkan di Kecamatan Medan Amplas dan dilaksanakan di Arena Ramadhan Fair. Melalui pelaksanaan kegiatan ini diharapkan dapat mendorong para anak-anak untuk aktif membaca Al-Qur'an terutama selama bulan puasa berlangsung.
  - 8) Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Tila-watil Qur'an (LPTQ) dengan peserta sebanyak 198 orang.
    - Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan peran dan fungsi LPTQ Kota Medan dalam membina dan melatih Kader-kader Qori/Qori'ah, Hafisz/Hafizah dll.
  - 9) Terlaksananya Kegiatan Operasional Pembinaan Kegiatan Keagamaan, Pendidikan, Kepemudaan dan Keolahragaan oleh Tim di 21 Kecamatan yang ada di Kota Medan
    - Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengum-pulkan informasi dan aspirasi masyarakat sehubungan dengan pemberian bantuan di bidang keagamaan, pendidikan, kepemu-daan dan keolahragaan.

Penyelenggaraan sub urusan agama dan pendidikan selama tahun 2008 menghasilkan manfaat dan dampak antara lain:

- 1) Peningkatan komunikasi sosial dan kemasyarakatan antara Pemerintah Kota dengan masyarakat guna menciptakan kehidupan sosial keagamaan yang harmonis.

- 2) Peningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pengamalan dibidang keagamaan di kalangan warga masyarakat guna peningkatan moralitas dan pemeliharaan kondusifitas Kota Medan.

#### **11. Sub Urusan Kehumasan**

Keterpaduan implementasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan hubungan masyarakat selama tahun 2008 didukung oleh anggaran belanja daerah :

- Belanja Langsung sebesar Rp. 1.450.000.000,-
- Total Belanja Daerah SKPD Rp.1.450.000.000,-

Berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan anggaran yang dijalankan seperti efisiensi, efektif, transparan dan akuntabel maka realisasi belanja daerah untuk urusan Bagian Humas per 31 Desember 2008 sebesar Rp. 1.189.646.450,- atau 82,045%.

Pelaksanaan program dan kegiatan urusan Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Medan tahun 2008 mengacu kepada RKA-SKPD/ DPA-SKPD yang ditetapkan, serta prinsip-prinsip daya guna dan hasil guna dari implementasi pelaksanaannya sekaligus pertimbangan kemampuan keuangan daerah. Implementasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran belanja langsung SKPD urusan Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Medan, menghasilkan keluaran (out put) sebagai berikut:

##### **1) Program Administrasi Perkantoran**

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan ini menghasilkan keluaran (out put) pokok antara lain:

- Tersedianya ATK  
ATK ini dibutuhkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan pelayanan administrasi kantor selama tahun 2008.
- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

Barang cetakan dan penggandaan ini di-maksudkan untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan administrasi kantor selama tahun 2008, sekaligus menyeienggarakan tugas-tugas pokok dan fungsi SKPD pada urusan Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Medan.

- Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

- Tersedianya Pidato Kepala Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mempersiapkan pidato Kepala daerah dalam kegiatan pada penyelenggaraan Pemerintahan atau penyelenggaraan pembangunan kota Medan pada tahun 2008.

- Tersedianya Buku Kliping.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk menyediakan bacaan-bacaan dari koran, majalah dan tabloit tentang pembangunan kota Medan yang terhimpun dalam satu buku Kliping.

- Tersedianya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Untuk Liputan

Kegiatan ini dilaksanakan untuk melakukan liputan aktivitas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun penyelenggaraan pembangunan Kota Medan.

## 2) Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media

- Tersedianya pres release diberitakan melalui wartawan

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mensosialisasikan pembangunan kota Medan baik dibidang pelayanan publik maupun dibidang pembangunan lainnya yang berhubungan dengan pemerintahan Kota Medan melalui Media Massa

- Tersedianya pemberitaan kepada 60 wartawan

Kegiatan ini dilaksanakan untuk jasa kepada 60 wartawan yang bertugas di Pemerintah Kota Medan.

Penyelenggaraan urusan kehumasan selama tahun 2008 menghasilkan manfaat dan dampak antara lain :

- Adanya media informasi Pemda yang dapat diakses publik tahun 2008

**c. Satuan SKPD Penyelenggara**

Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum oleh sekretariat daerah dilaksanakan oleh beberapa bagian, antara lain :

1. Bagian Umum
2. Bagian Perekonomiamn
3. Bagian Bina Program
4. Bagian Tata Pemerintahan
5. Bagian Kesejahteraan
6. Bagian Hubungan Antar Kota dan Daerah
7. Bagian Hukum
8. Bagian Keuangan
9. Bagian Pemberdayaan Perempuan
10. Bagian Agama dan Pendidikan
11. Bagian Hubungan masyarakat

Secara struktual dan koordinatif, penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan umum oleh sekretaris daerah dan dibantu oleh para asisten, dan Kepala Bagian dengan mengembangkan koordinasi fungsional dengan SKPD terkait.

**d. Profil Kepegawaian**

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai
1	Sekretaris Daerah	1
2	Asisten Pemerintahan Umum	1
3	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	1
4	Asisten Kesejahteraan Sosail	1
5	Asisten Administrasi Umum	1
6	Bagian Kesejahteraan Rakyat	10
7	Bag. Pemberdayaan Perempuan	9
8	Bagian Bina Program	28
9	Bagian Bina Perekonomian	19
10	Bagian Hubungan Antar Kota dan Daerah	8
11	Bagian Agama dan Pendidikan	10

12	Bagian Tata Pemerintahan	17
13	Bagian Keuangan	63
14	Bagian Umum	77
15	Bagian Humasy	12
16	Bagian Hukum	25
	Jumlah	283

**e. Alokasi dan Realisasi Anggaran**

Untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan umum pada tahun 2008 dialokasikan anggaran untuk belanja daerah sebesar Rp.269.459.950.882,00 yang ditetapkan dalam APBD/PAPBD Kota Medan Tahun 2008, yang terdiri dari belanja langsung Rp.171.048.138.306,00 dan Rp.98.411.812.576,00 belanja tidak langsung. Sampai akhir tahun 2008, realisasi anggaran per 31 desember 2008 mencapai Rp.190.990.286.016,00 atau sekitar 70,88%.

**f. Perencanaan Pembangunan**

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan surat edaran bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Petunjuk Penyelenggaraan Musrenbang tahun 2008, perencanaan, pemrograman dan penganggaran urusan sekretariat daerah dilakukan dengan 3 (tiga) pendekatan, yaitu (1) bottom up planning, (2) top down planning (3) up down planning. Proses perencanaan seluruhnya dimulai dari proses teknokratis, partisipatif dan penetapan sehingga menjadi APBD Kota Medan TA. 2008, KUA/PPAS TA. 2008 dan P.APD Kota Medan TA. 2008. Salah satu proses perencanaan kota yang paling efektif adalah melalui Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang diselenggarakan secara berjenjang mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, sampai tingkat kota, di samping mengikuti musrenbang tingkat propinsi dan

nasional. Melalui forum musrenbang ini berbagai tuntutan, kebutuhan dan kepentingan pembangunan kota dapat disinkronisasikan sebagai prioritas pembangunan kota tahun 2008.

**g. Kondisi Sarana dan Prasarana**

Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum oleh sekretariat daerah didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana seperti gedung kantor yang terintegrasi, perlengkapan dan kelengkapan gedung kantor yang relatif telah memadai dan mencukupi. Hal yang masih perlu ditingkatkan adalah aspek pemeliharaan gedung kantor, di samping peningkatan rasio beberapa perlengkapan dan peralatan gedung kantor, guna mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi sekretariat daerah lebih optimal.

**h. Permasalahan dan Solusi**

Secara Umum masalah – masalah pelaksanaan tugas pada Bagian Umum Setdakot Medan diakibatkan oleh beberapa faktor antara lain :

- 1) Adanya kegiatan–kegiatan yang harus dilaksanakan secara insidental atau yang bersifat mendadak tanpa direncanakan lebih dahulu, yang memiliki konsekwensi anggaran.
- 2) Sistem manajemen keuangan yang belum dikuasai sepenuhnya oleh staff pengelola.

Untuk mengatasi masalah–masalah tersebut berbagai solusi yang dilakukan, antara lain :

- 1) Peningkatan koordinasi antar SKPD.
- 2) Memberikan informasi yang jelas dan transparan tentang pengadaan barang dan jasa.

3) Konsultasi teknis tentang manajemen keuangan daerah.

a. Sub Bina Perekonomian

Peningkatan kualitas pelaksanaan tugas pada bagian bina perekonomian Setdakot Medan masih dihadapkan kepada beberapa masalah pokok antara lain :

- 1) Terlambatnya pengiriman data dari masing-masing SKPD sehingga mengalami keterlambatan dalam menyusun standard harga barang kebutuhan Pemko Medan .

Solusi tindak lanjut yang dijalankan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut antara lain :

- 1) Meningkatkan koordinasi antar masing-masing SKPD untuk kelancaran tugas-tugas SKPD.

b. Sub Urusan Tata Pemerintahan

Peningkatan kualitas pelaksanaan tugas pada bagian tata pemerintahan Setdakot Medan masih dihadapkan kepada beberapa masalah pokok antara lain :

- 1) Keterlambatan proses pengesahan APBD 2008 yang berakibat langsung pada ketidakcukupan waktu pelaksanaan beberapa program dan kegiatan yang sudah direncanakan dan dianggarkan untuk tahun 2009.

Beberapa langkah penanganan yang dapat dilakukan antara lain:

- 1) Memaksimalkan implementasi program dan kegiatan yang mendapat prioritas utama seperti kegiatan pemantauan kelurahan dan pemberdayaan kecamatan serta kelurahan.

c. Sub Urusan Kesejahteraan

Peningkatan akses PMKS terhadap pelayanan sosial sampai tahun 2008 masih di hadapkan kepada beberapa permasalahan pokok antara lain :

- 1) Meningkatnya penyandang masalah kesejahteraan sosial
- 2) Kurangnya kemudahan dalam mengakses pelayanan sosial.
- 3) Rendahnya derajat kesehatan masyarakat
- 4) Belum meratanya pembinaan dan pemberian bantuan kepada penyandang masaalah kesejahteraan sosial.

Solusi tindak lanjut yang dijalankan, dalam rangka peningkatan akses, PMKS terhadap pelayanan sosial, antara lain :

- 1) Mendorong perluasan akses pelayanan social yang bermutu dan lebih merata terutama kepada penyandang masalah kesejahteraan social
- 2) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui penyuluhan kesehatan tentang bahaya Narkoba dan HIV/AIDS
- 3) Meningkatkan wawasan pengurus dalam mengelola Panti Asuhan dan kelompok Usaha penyandang Cacat di Kota Medan.
- 4) Meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan Lansia

d. Sub Urusan Bina Program

Sebagai pengendali, pengawas, dan sebagai tempat evaluasi pelaksanaan kegaitan-kegiatan di jajaran Pemerintah Kota Medan, Bagian Bina Program dalam melaksanakan tupoksinya memiliki beberapa permasalahan sebagai berikut :

- 1) Proses pengadaan barang/jasa pada masing-masing SKPD di jajaran Pemerintah Kota Medan tidak sepenuhnya dapat diketahui perkembangannya, disebabkan oleh kurangnya koordinasi termasuk penyampaian laporan kegiatan.
- 2) Pelaksanaan monitoring (pengawasan) yang merupakan salah satu tugas pokok Bagian Bina Program Setda Kota Medan pada saat kegiatan pembangunan dilaksanakan belum dapat dilakukan secara maksimal disebabkan oleh keterbatasan prasarana operasional dan data fisik yang disampaikan oleh SKPD.
- 3) Setiap SKPD di jajaran Pemerintah Kota Medan belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban untuk melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Walikota Medan c/q Bagian Bina Program Sekretariat Daerah Kota Medan baik realisasi fisik maupun realisasi keuangan kegiatan untuk dapat dilakukan evaluasi.
- 4) Setiap laporan yang disampaikan oleh SKPD kepada Walikota Medan c/q Bina Program Sekretariat Daerah Kota Medan tidak sepenuhnya memuat data-data permasalahan program dan kegiatan yang dihadapi terutama dibidang fisik/infrastruktur. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilaporkan.

Adapun solusi yang telah dilaksanakan oleh Bagian Bina Program Sekretariat Daerah Kota Medan dalam mengatasi permasalahan di atas adalah :

- 1) Agar pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa pemerintah di jajaran Pemerintah Kota Medan dapat dipantau perkembangannya oleh Bagian Bina Program Sekretariat Daerah Kota Medan ditempatkan staf untuk dapat diikutsertakan dalam susunan panitia pengadaan pada SKPD yang bersangkutan.
- 2) Mengumpulkan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan SKPD baik realisasi fisik maupun keuangannya secara tepat waktu.
- 3) Untuk memperoleh permasalahan implementasi program dan kegiatan yang dihadapi oleh SKPD maka Bagian Bina program Sekretariat Daerah Kota Medan melaksanakan koordinasi secara langsung dengan SKPD terkait.

e. Sub Urusan Hubungan Antar Kota Dan Daerah

Peningkatan kerjasama dan hubungan dalam dan luar negeri serta antar kota dan antar daerah masih dihadapkan pada beberapa permasalahan pokok antara lain:

- 1) Kegiatan yang bersifat *High Cost* (biaya tinggi) karena kegiatan yang dilakukan senantiasa mengacu kepada standart dan protocol Internasional dengan prinsip *resiprocal* (Perlakuan Timbal Balik).
- 2) Kecermatan mensinkronkan dan menselaraskan masing-masing kebijakan dari 2 (dua) atau lebih kebijakan Pemerintah Kota dan atau Negara yang mempunyai kekhasan masing-masing sesuai dengan nilai yang dianut dan budaya yang berkembang di Negara dan atau Kota masing-masing.
- 3) Penyesuaian dengan Mitra Kerjasama di Luar Negeri yang relative lebih disiplin dan konsisten khususnya dalam waktu penyelenggaraan dan sistem anggaran yang dianut.

- 4) Hambatan komunikasi yang dilakukan yang bersifat komunikasi jarak jauh/antar Negara (antar bangsa) melalui teknologi tinggi (Internet, E-mail, dan SLI), sehingga sangat mempengaruhi waktu kegiatan, perubahan jadwal, personil yang terlibat, dan acara yang bersifat protokoler.
- 5) Perlunya secara luas stakeholders dan masyarakat untuk aktif memanfaatkan hubungan dan kerjasama baik di Dalam Negeri dan Luar Negeri yang sudah terjalin selama ini, agar hubungan dan kerjasama tersebut dapat memberikan manfaat dalam pembangunan kota.

Solusi tindak lanjut yang dijalankan, dalam rangka peningkatan manfaat hubungan antar kota dan antar daerah antara lain:

- 1) Peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia.
- 2) Memantapkan koordinasi baik secara internal di lingkungan Pemerintah Kota Medan maupun dengan berbagai pihak lain yang relevan.

f. Sub Urusan Hukum

Peningkatan akses, dan manajemen hukum sampai Tahun 2008 masih dihadapkan kepada beberapa permasalahan pokok antara lain :

- 1) Banyaknya produk-produk hukum yang sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru.
- 2) Belum konsistennya pelaksanaan maupun penerapan Peraturan Daerah.
- 3) Banyaknya kasus-kasus yang muncul yang dihadapi Pemko Medan, namun dalam penyelesaiannya sulit untuk memperoleh data-data yang akurat untuk menunjang proses pembuktian di pengadilan dan tingkat yang lebih tinggi.
- 4) Kasus-kasus pidana yang melibatkan aparatur Pemko Medan cenderung menunjukkan peningkatan.

Solusi tindak lanjut yang dijalankan dalam rangka peningkatan akses, dan manajemen hukum, antara lain :

- 1) Menata kembali produk-produk hukum Pemko Medan seperti: Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang baru dan relevan untuk kebutuhan serta tuntutan pembangunan Kota Medan.
- 2) Meningkatkan pengujian terhadap produk-produk hukum Pemerintah Kota yang akan diterbitkan agar lebih berkualitas dan sesuai dengan tuntutan pembangunan kota.
- 3) Meningkatkan pelaksanaan maupun penerapan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan.
- 4) Meningkatkan koordinasi antar instansi Pemerintah.
- 5) Memberikan perlindungan hukum kepada aparatur Pemko Medan yang terlibat kasus-kasus pidana dengan mendampingi saat dilakukan pemeriksaan di Kepolisian dan Kejaksaan.
- 6) Perlunya penyuluhan hukum yang dilaksanakan secara terus-menerus dilingkungan Pemko Medan.

g. Sub Urusan Keuangan Daerah

Penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan daerah sampai saat ini masih dihadapkan pada berbagai masalah dan tantangan yang kompleks antara lain :

- 1) Adanya perubahan regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah.
- 2) Masih banyak aparatur yang kurang memahami regulasi pengelolaan keuangan daerah yang baru
- 3) Masih kurangnya jumlah aparatur yang memiliki kualifikasi pendidikan tentang akuntansi dan keuangan daerah.
- 4) Belum tersedianya sistem (aplikasi) pengelolaan keuangan daerah.

Berbagai solusi pemecahan masalah yang dilakukan adalah :

- 1) Perlunya pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif dan efisien dengan berbagai kebijakan dan pengelolaan keuangan yang berbasis kinerja.
- 2) Melaksanakan bimbingan dan pelatihan aparatur pengelolaan keuangan daerah dantara lain kepada bendaharawan, pejabat penatausahaan keuangan, dan pejabat esoloneering pada seluruh SKPD.
- 3) Membangun sistem pengelolaan keuangan daerah baik dalam bentuk aplikasi komputer maupun regulasi pengelolaan keuangan daerah.

h. Sub Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Peningkatan kesetaraan dan pengarusutamaan gender dalam proses pembangunan kota sampai tahun 2008 masih dihadapkan pada masalah pokok antara lain:

- 1) Masih adanya Kesenjangan Gender atau Ketidaksetaraan Gender dan Ketidakadilan Gender ditengah-tengah masyarakat.

Solusi tindak lanjut yang dijalankan dalam rangka mendorong pengarusutamaan gender antara lain:

- 1) Mempertimbangkan dimensi gender dalam seluruh tahapan dan proses pembangunan kota untuk memberi peluang yang semakin besar bagi perempuan untuk berperan aktif.
- 2) Memberdayakan instansi-instansi pemerintah dan organisasi lainnya agar dapat lebih berpartisipasi dalam peningkatan peran perempuan dalam pembangunan kota.
- 3) Peningkatan peran serta masyarakat dalam memberdayakan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG).

i. Sub Urusan Agama Dan Pendidikan

Selama tahun anggaran 2008, masalah atau kendala yang dihadapi oleh sub bagian agama dan pendidikan Setda Kota Medan diantaranya:

- 1) SDM personil penyelenggara masih terbatas baik kualitas maupun kuantitas.

Solusi tindak lanjut yang dijalankan dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas keagamaan dan pendidikan antara lain:

- 1) Penambahan personil dan peningkatan Diklat pengelolaan program/kegiatan serta peningkatan kinerja.

j. Sub Urusan Kehumasan

Secara umum permasalahan yang masih timbul dalam pelaksanaan program Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Medan antara lain:

- 1) Masih rendahnya SDM PNS Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Medan khususnya dibidang Kehumasan, disebabkan PNS di Bagian Humasy rata-rata hanya lulusan pendidikan umum setingkat SMP dan SLTA, selain itu PNS dibagian Humasy perlu mendapat pendidikan khusus atau setingkat pelatihan atau seminar dibidang Kehumasan.

- 2) Masih belum mencukupinya sarana kerja kegiatan Liputan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah berupa kendaraan roda dua bagi PNS yang melakukan Liputan pada kegiatan Kepala Daerah maupun Wakil Kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

**2. Urusan Daerah Tingkat Kecamatan**

Dalam rangka mendukung proses pembangunan kota yang lebih berbasis peran serta masyarakat maka beberapa program pembangunan kota ditetapkan pengelolaan pelaksanaannya dalam tahun 2008 berada di tingkat kecamatan.

**a. Program dan Kegiatan**

Program dan kegiatan pembangunan kota tingkat kecamatan tersebut antara lain :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - 1.1. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran
  
- 2) Program Peningkatan dan Pemberdayaan Kecamatan/ Kelurahan
  - 2.1. Penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat
  
- 3) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
  - 3.1. Pemeliharaan sarana/prasarana jalan
  
- 4) Program Pemeliharaan Saluran Drainase
  - 4.1. Pemeliharaan saluran drainase tertier

**b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

Sesuai dengan alokasi anggaran belanja daerah yang telah ditetapkan dalam APBD/P.APD Kota Medan TA. 2008, penyelenggaraan urusan pemerintahan umum tingkat kecamatan, didukung oleh alokasi belanja daerah sebesar Rp.90.107.497.449,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp.52.594.644.474,- dan Belanja Langsung (BL) sebesar Rp.9.914.585.175,- dimana sampai akhir tahun anggaran implementasi program dan kegiatan realisasi anggaran Per 31 Desember 2008 mencapai Rp.75.517.053.350,-

Pelaksanaan program, kegiatan dan urusan pemerintahan umum tingkat kecamatan selama tahun 2008 menghasilkan output (keluaran) sebagai berikut :

- 1) Tersedianya pegawai honorer/tidak tetap dan honorer pegawai honor/PHL di 21 Kecamatan sebanyak 22 orang
- 2) Tersedianya honorarium Lurah 151 orang, Sekretaris Lurah sebanyak 106 orang, Kaur Kelurahan sebanyak 36 orang, staf administrasi kelurahan 68 orang dan Kepala Lingkungan sebanyak 2001 orang, tersebar di 21 kecamatan.

### **c. Permasalahan dan Solusi**

Secara kelembagaan, fungsi dan peran kecamatan/kelurahan dalam pembangunan kota masih dihadapkan kepada beberapa permasalahan pokok antara lain :

- 1) Terbatasnya dukungan ketersediaan SDM aparatur, terutama SDM dengan kompetensi teknis yang diperlukan
- 2) Penanganan pengelolaan program-program pembangunan kota yang masih terbatas.

Untuk mengatasi kelemahan tersebut, dilakukan pembinaan manajemen program bagi unsur pelaksana di tingkat kecamatan secara bertahap dan berkesinambungan.

## **3. Fungsi Sekretariat DPRD**

### **a. Program dan Kegiatan**

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD Kota Medan pada Tahun 2008 dibidang Administrasi Umum Pemerintahan telah dijabarkan kedalam bentuk Program dan Kegiatan–kegiatan Pokok selama Tahun 2008 sebagai berikut :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari :
  - 1.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - 1.2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan listrik
  - 1.3. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

- 1.4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
  - 1.5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
  - 1.6. Penyediaan Alat Tulis Kantor
  - 1.7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - 1.8. Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Gedung Kantor
  - 1.9. Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-undangan
  - 1.10. Penyediaan Makanan dan Minuman
  - 1.11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah
  - 1.12. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran
- 2) Program Peningkatan Prasarana Aparatur terdiri dari ;
- 2.1. Pembangunan Gedung Kantor
  - 2.2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
  - 2.3. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
  - 2.4. Pengadaan Meubelur
  - 2.5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
  - 2.6. Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor
- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur terdiri dari:
- 3.1. Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya
  - 3.2. Penyediaan Pakaian Khusus hari –hari tertentu
- 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 4.1. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
- 5) Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan terdiri dari ;
- 5.1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar laporan realisasi kinerja SKPD
  - 5.2. Penyusunan pelaporan keuangan Semesteran

- 5.3. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
  - 5.4. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
- 6) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari ;
- 6.1. Pembahasan rancangan Peraturan Daerah
  - 6.2. Hearing/Dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama
  - 6.3. Rapat-rapat alat kelengkapan dewan
  - 6.4. Rapat-rapat paripurna
  - 6.5. Kegiatan Reses
  - 6.6. Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah
  - 6.7. Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD
  - 6.8. Sosialisasi peraturan perundang-undangan
  - 6.9. Rapat kerja DPRD

**b. Pencapaian Program dan Kegiatan**

Pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran SKPD Sekretariat DPRD Kota Medan selama Tahun 2008, mengacu kepada RKA-SKPD/DPA-SKPD yang ditetapkan, serta prinsip daya guna dan hasil guna dari imlementasi pelaksanaanya, sekaligus pertimbangan kemampuan keuangan daerah. Untuk Implementasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan pemerintahan umum Sekretariat DPRD Kota Medan selama tahun 2008, didukung oleh alokasi anggaran belanja daerah yang terdiri dari :

- Belanja tidak langsung sebesar	Rp. 2.090.264.245,-
- Belanja langsung sebesar	Rp. <u>14.973.578.250.-</u>
Total Belanja Daerah sebesar	Rp. 17.063.842.495,-

Sesuai dengan prinsip-prinsip efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan yang diselenggarakan pada tahun 2008, realisasi belanja daerah per 31 Desember 2008 pada Sekretariat DPRD Kota Medan sebesar Rp. 13.118.200.657,- sama

dengan 6,88%. Implementasi pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran belanja langsung SKPD Sekretariat DPRD Kota Medan, menghasilkan keluaran (output) sebagai berikut :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran :

Realisasi pelaksanaan program/kegiatan ini menghasilkan keluaran (output) pokok antara lain :

- Terselenggaranya peliputan berita oleh Pers baik media cetak maupun elektronik selama 1 tahun, tersedianya jasa tenaga instruktur senam selama 1 Tahun, dan tersedianya benda pos yang menunjang proses kegiatan surat-menyurat kantor.
- Tersedianya saluran telepon setiap bulannya diseluruh alat kelengkapan DPRD, Fraksi dan Sekretariat yang berjumlah 16 (enam belas) jaringan telepon. Tujuan Kegiatan ini untuk memperoleh dan mengakses informasi-Informasi yang dibutuhkan melalui jaringan internet dan sambungan telepon.
- Tersedianya jasa administrasi keuangan. Kegiatan ini berupa dana partisipasi selama 1 (satu) Tahun sebagai keikutsertaan DPRD Kota Medan dalam wadah Asosiasi Dewan Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI).
- Tersedianya Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Anggota DPRD dan Keluarga selama 1 (satu) Tahun. Tujuan dari kegiatan ini untuk memberikan kesehatan Anggota DPRD guna menunjang Produktifitas Anggota DPRD sebanyak 45 (empat puluh lima orang) dalam pelaksanaan tugas-tugas DPRD.
- Tersedianya jasa kebersihan kantor. Tujuan dari kegiatan ini adalah terciptanya lingkungan kantor yang bersih dan nyaman
- Tersedianya Alat Tulis Kantor sebanyak 1 (satu) Paket, tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah sarana pendukung penyelenggaraan pelayanan Adminsitration

Perkantoran Sekretariat DPRD Kota Medan selama 1 (satu) Tahun.

- Tersedianya barang cetakan dan Penggandaan sebanyak 2 (dua) Paket, penyediaan barang cetakan dan penggandaan ini dimaksudkan untuk menjamin ketersediaan pendukung administrasi kantor selama 1 (satu) tahun sekaligus sarana penunjang penyelenggaraan tugas–tugas pokok dan fungsi SKPD Sekretariat DPRD Kota Medan terutama dalam urusan administrasi umum pemerintahan.
- Tersedianya komponen instalasi/penerangan listrik sebanyak 1 (satu) Paket. Kegiatan ini bertujuan terjaminnya penerangan yang memadai di seluruh ruangan gedung kantor selama 1 (satu) Tahun.
- Tersedianya bahan bacaan berupa surat kabar/majalah. penyediaan bahan bacaan ini sebagai sarana Informasi sekaligus menambah wawasan oleh media–media cetak keseluruh alat–kelengkapan DPRD dan Sekretariat DPRD .
- Tersedianya makanan dan minuman. Penyediaan makanan dan minuman ini dimaksudkan untuk mendukung kegiatan buka Puasa Bersama, Open House Pimpinan DPRD dan Rutin Kegiatan Senam DPRD dan Sekretariat serta rutin harian DPRD dan Sekretariat.
- Terselenggaranya rapat–rapat koordinasi dan konsultasi DPRD dan Sekretariat. Tujuan kegiatan ini agar DPRD/Alat kelengkapan DPRD dan Sekretariat DPRD dapat melaksanakan konsultasi dengan Departemen/ Instansi Vertikal lainnya di luar daerah dalam rangka sharing informasi guna menunjang efektifitas fungsi Dewan.
- Tersedianya staf administrasi Non PNS sebanyak 29 (Dua puluh sembilan) orang di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Medan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk

mendukung administrasi umum perkantoran dan kegiatan non administrasi pendukung kegiatan Alat Kelengkapan DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Medan.

2. Program Peningkatan Prasarana Aparatur

- Terselenggaranya pembangunan gedung kantor. kegiatan ini untuk penyediaan ruangan lobby dan perpustakaan di gedung DPRD Kota Medan.
- Terselenggaranya pengadaan perlengkapan gedung kantor. Kegiatan ini mendukung ketersediaan white board untuk ruangan panggar dan ruangan sidang, gordyn vitrage, ambal sholat dan bendera gantung serta 1 (satu) unit papan pengumuman pemberian informasi kepada DPRD dan aparatur Sekretariat serta masyarakat.
- Terselenggaranya pengadaan peralatan gedung kantor. Kegiatan ini dimaksudkan untuk pengadaan pengharum ruangan yang diperuntukkan di ruangan pimpinan DPRD, komisi-komisi dan ruangan sidang DPRD guna menambah suasana nyaman di dalam ruangan kantor, mesin penghancur kertas sebanyak 6 (enam) unit, kipas angin gantung sebanyak 6 (enam) unit, hexos fan sebanyak 7 (tujuh) unit serta pengadaaan Komputer PC sebanyak 2 (dua) unit. Tujuan kegiatan ini untuk penyediaan fasilitas dan sarana gedung/sekretariat DPRD.
- Pengadaan Muebeler, dalam bentuk pengadaan kursi kerja sebanyak 100 (seratus) unit untuk menggantikan kursi–kursi kerja yang tidak layak pakai.
- Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala gedung Kantor berupa jasa borongan pengecatan gedung kantor, perbaikan kamar mandi Sekretaris DPRD, perbaikan kamar mandi ruangan ketua DPRD. Maksud dan tujuan kegiatan ini untuk menjaga kualitas fasilitas prasarana gedung yang layak dan bernilai estetis sebagai penunjang tugas dan fungsi DPRD.

- Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor berupa pemeliharaan komputer, AC, sound sistem, dan pesawat telepon. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menjaga kualitas peralatan–peralatan gedung kantor dalam keadaan baik dan layak pakai.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- Tersedianya pakaian sipil resmi, pakaian sipil harian dan pakaian dinas harian bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekwan dan Pegawai Harian Lepas (PHL) sebanyak 306 (tiga ratus enam) stel. Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan disiplin, semangat dan kinerja aparatur.
  - Tersedianya pakaian khusus hari–hari tertentu berupa penyediaan pakaian olahraga untuk senam kesegaran Jasmani sebanyak 30 (tiga puluh) stel. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menciptakan keseragaman dalam berpakaian olahraga disaat melaksanakan senam kesegaran jasmani ataupun acara–acara olahraga lainnya.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang–undangan sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang. Kegiatan ini berupa bimbingan teknis, kursus dan SEMILOKA bagi PNS di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Medan dengan tujuan meningkatkan kualitas sumber daya aparatur Sekretariat DPRD Kota Medan.
5. Program Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
- Pembahasan rancangan peraturan daerah. Kegiatan ini berupa pembahasan 4 (empat) ranperda Kota Medan Tahun 2008. Kegiatan ini dimaksudkan untuk membantu/memfasilitasi DPRD dalam rangka melaksanakan pembahasan Ranperda Kota Medan.

- Rapat–rapat alat kelengkapan Dewan berupa rapat–rapat intern Pimpinan DPRD, Komisi–Komisi, Badan Kehormatan DPRD. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memfasilitasi/membantu untuk pelaksanaan tugas dan fungsi wewenang DPRD sebagai perwujudan tanggung jawab DPRD kepada masyarakat.
- Terlaksananya rapat–rapat paripurna DPRD. Kegiatan ini berupa proses pembahasan dan pengesahan Ranperda APBD, LKPJ, LPJ Walikota, Ranperda P.APBD Kota Medan dan Paripurna Istimewa berupa mendengarkan pidato Kepala Negara menjelang hari kemerdekaan RI, Ulang Tahun Kota Medan, dan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD dan Rapat Paripurna Istimewa lainnya.
- Terlaksananya kegiatan Reses DPRD. Kegiatan ini berupa kunjungan Anggota DPRD ke Wilayah Daerah Pemilihan (DAPEM) masing–masing. Kegiatan ini untuk menampung dan menjaring aspirasi langsung dari masyarakat mengenai pembangunan Kota Medan, yang kemudian akan menjadi bahan masukan untuk pelaksanaan pembangunan tahun berjalan ataupun tahun berikutnya.
- Terlaksananya kunjungan kerja anggota DPRD dalam daerah. Kegiatan ini berupa kunjungan DPRD ke Instansi Pemerintah dan Swasta yang ada di Kota Medan berupa monitoring ataupun tindak lanjut atas laporan masyarakat. Kegiatan ini untuk mendukung/memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan DPRD sebagai perwujudan tanggung jawab DPRD kepada masyarakat.
- Terlaksananya peningkatan kapasitas Pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 45 (empat puluh lima) orang. Kegiatan ini berupa bimbingan teknis, kursus dan SEMILOKA bagi pimpinan dan anggota DPRD Kota Medan. Kegiatan ini dimaksudkan meningkatkan wawasan dan pengetahuan SDM pimpinan dan anggota DPRD guna meningkatkan kinerja dan kualitas keputusan DPRD.

Penyelenggaraan urusan Sekretariat DPRD selama tahun 2008 menghasilkan manfaat dan dampak antara lain:

- Meningkatnya wawasan dan pengetahuan SDM Pimpinan dan Anggota DPRD sehingga bermanfaat bagi peningkatan kinerja dan kualitas keputusan DPRD.
- Semakin membaiknya kualitas pembahasan dan pengkajian terhadap Ranperda yang akan dihasilkan oleh Dewan.

**c. SKPD Penyelenggara**

Secara kelembagaan, penyelenggaraan tugas urusan pemerintahan umum Sekretariat DPRD adalah membantu, memfasilitasi dan melayani tugas –tugas kelembagaan DPRD, dengan mengembangkan koordinasi dengan instansi –instansi terkait.

**d. Profil SDM Aparatur**

Pegawai Sekretariat DPRD Kota Medan seluruhnya berjumlah 64 (enam puluh empat) orang, dengan rincian 31 (tiga puluh satu) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 33 (tiga puluh tiga) orang Pegawai Harian Lepas (PHL) yang tersebar di seluruh sub bagian organisasi sekretariat dan alat–alat kelengkapan DPRD Kota Medan. Berdasarkan Golongan, yang paling banyak jumlahnya adalah Gol. III dan IV

Komposisi Pegawai

Sekretariat DPRD Kota Medan Menurut Golongan

No	Golongan	Jumah ( orang )	%
1	IV	4	13
2	III	24	77
3	II	3	10
4	I		0
	<b>Jumlah</b>	31	100

Menurut tingkat pendidikan, pegawai pada Sekretariat DPRD Kota Medan didominasi oleh pegawai tingkat SLTA sebanyak 19 (sembilan belas) orang, Sarjana S-2 sebanyak 2 (dua) orang, Sarjana S-1 sebanyak 9 (sembilan) orang, sedangkan SLTP 1 (satu) orang.

Komposisi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat DPRD  
Kota Medan menurut Tingkat Pendidikan Normal

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah	%
1	S-2	2	6
2	S-1	9	29
3	Sarmud / Diploma	0	0
4	SLTA	19	62
5	SLTP	1	3
6	SD	0	0
	<b>Jumlah</b>	31	100

Berdasarkan komposisi kepegawaian di Sekretariat DPRD Kota Medan tersebut di atas, sebanyak 62 % didominasi oleh Staf dengan latar belakang pendidikan SLTA sederajat. Kondisi ini dianggap belum memadai mengingat perkembangan dan tantangan kerja yang cenderung semakin SDM aparatur dalam berbagai keterampilan khusus.

**e. Alokasi dan Realisasi Anggaran**

Pelaksanaan program dan kegiatan urusan administrasi pemerintahan umum Sekretariat DPRD Kota Medan selama Tahun 2008, didukung oleh alokasi anggaran belanja daerah yang terdiri dari:

- Belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.090.264.245,-
- Belanja langsung sebesar Rp. 14.973.578.250.-
- Total Belanja Daerah sebesar Rp. 17.063.842.495,-

Sesuai dengan prinsip-prinsip efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan yang diselenggarakan pada tahun 2008, realisasi belanja daerah per 31 Desember 2008 pada Sekretariat DPRD Kota Medan sebesar Rp. 13.118.200.657,- dengan jumlah presentase 76,88%.

**f. Proses Perencanaan Pembangunan**

Sebagai bagian manajemen pembangunan, maka penyelenggaraan urusan Sekretariat DPRD Kota Medan selama tahun 2008 mengacu kepada beberapa dokumen pokok perencanaan, seperti (1) Renstra SKPD, (2) Renja SKPD (3) RKA-SKPD. Program-program kerja yang diselenggarakan selama tahun 2008 juga diupayakan memiliki sinkronisasi yang kuat dengan program-program RKPD yang ditetapkan dalam tahun 2008 termasuk RPJPM Kota Medan 2006 - 2010.

Adanya program kerja dalam RKPD yang tidak terakomodir dalam Renja-SKPD, demikian juga program kerja dalam Renja yang tidak diakomodir dalam RKA/DPA-SKPD lebih disebabkan perlunya pengintegrasian perencanaan baik yang bersifat top down, maupun bottom up-planning.

**g. Kondisi Prasarana dan Sarana**

Sarana dan prasarana kerja di lingkungan sekretariat DPRD Kota Medan hingga Tahun 2008 pada umumnya telah lebih baik dari tahun sebelumnya, seperti kondisi gedung yang selalu mendapat perawatan secara kontiniu setiap tahunnya, kondisi halaman sebagai tempat parkir kendaraan anggota DPRD, sekretariat dan masyarakat umum telah tertata dengan rapi, pemanfaatan ruangan di dalam gedung telah digunakan se-optimal mungkin sesuai dengan kebutuhan. Sementara sarana operasional sebagai penunjang kerja yang digunakan pegawai telah lebih baik dibanding dengan tahun sebelumnya, ini ditandai dengan penggantian dan penambahan mebel, komputer serta

inventaris lainnya yang merupakan sarana penunjang kinerja aparatur Sekretariat DPRD sebagai unsur pelayan bagi DPRD dan masyarakat umum.

#### Komposisi Inventaris Sekretariat DPRD Kota Medan Tahun 2008

No	Nama Barang	Jumlah	Ket. Kondisi
1	Kendaraan Roda 4	23 unit	Baik
2	Kendaraan Roda 2 (Spd.Motor)	5 unit	Baik
3	Komputer	24 unit	Baik
4	Laptop	5 unit	Baik
5	Camera Digital	1 unit	Baik
6	Handycam	2 unit	Baik
7	Infocus	2 unit	Baik
8	Meja ½ biro	70 buah	Baik
9	Meja Biro	75 buah	Baik
10	Kursi Putar Eksekutif	75 buah	Baik
11	AC Split	45 unit	Baik
12	Mesin Penghancur Kertas	6 unit	Baru

Keadaan inventaris di Sekretariat DPRD Kota Medan semuanya dalam kondisi baik, ketersediaan sarana kerja yang memadai dan layak tentunya diharapkan dapat mendukung kinerja, mobilitas dan kenyamanan kerja bagi DPRD dan Sekretariat DPRD

#### h. Permasalahan dan Solusi

Secara umum permasalahan yang terjadi pada Sekretariat DPRD Kota Medan selalu terjadi pada tahun-tahun sebelumnya:

1. Belum lengkapnya sistem pendataan dan pencatatan yang jelas terhadap tamu-tamu yang datang ke Kantor DPRD Kota Medan, sehingga terkesan suasana kantor seperti tempat orang berhilir mudik tanpa diketahui maksud dan tujuan mereka datang ke Kantor DPRD Kota Medan serta kurangnya kemampuan personel keamanan dalam mengantisipasi hal-hal tersebut .
2. Masih kurangnya sarana dan prasarana kantor sebagai penunjang kinerja aparatur Sekretariat DPRD Kota Medan.

Untuk mengantisipasi dan meminimalisir permasalahan tersebut, Seketariat DPRD Kota Medan menempuh langkah – langkah sebagai berikut :

1. Memaksimalkan fungsi dan tugas petugas keamanan dalam mengantisipasi hal hal yang tidak diinginkan dikemudian hari hingga dapat memberikan rasa aman, dan nyaman gedung DPRD.
2. Melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis kepada aparatur agar dapat terus meningkatkan kinerjanya.
3. Memperbaiki dan menambah sarana dan prasarana kantor yang memadai sebagai penunjang kinerja yang lebih baik dimasa yang akan datang.
4. Koordinasi yang terpadu sebagai upaya untuk mengoptimalkan sistem kerja Seketariat DPRD Kota Medan, DPRD dan Pemko Medan.
5. Memfasilitasi peningkatan frekuensi rapat/sidang para Anggota DPRD.

#### **4. Fungsi Pendapatan Daerah**

Tugas pokok Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan sesuai Keputusan Walikota Medan Nomor 25 Tahun 2005 adalah melaksanakan tugas sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang pendapatan daerah dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya.

Selanjutnya untuk melaksanakan visi dan misinya, Dinas Pendapatan Kota Medan TA. 2008 menetapkan 9 (sembilan) program dan 51 (lima puluh satu) kegiatan, yaitu :

##### **a. Program dan Kegiatan Tahun 2008**

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - 1.1. Penyediaan jasa surat menyurat
  - 1.2. Penyediaan jasa administrasi keuangan
  - 1.3. Penyediaan jasa kebersihan kantor
  - 1.4. Penyediaan alat tulis kantor

- 1.5. Penyediaan barang cetakan dan pengan-daan
  - 1.6. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
  - 1.7. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
  - 1.8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
  - 1.9. Penyediaan makanan dan minuman
  - 1.10. Jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
    - 2.1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
    - 2.2. Pengadaan peralatan gedung kantor
    - 2.3. Pengadaan meubeleur
    - 2.4. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
    - 2.5. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Kantor
    - 2.6. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
    - 3.1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
- 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
    - 4.1. Pendidikan dan pelatihan formal
    - 4.2. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
- 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
    - 5.1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
    - 5.2. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
    - 5.3. Penyusunan Rencana Kerja SKPD
    - 5.4. Penyusunan laporan bulanan

- 6) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
  - 6.1. Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah
  - 6.2. Operasional sekretariat Tim Anggaran
  - 6.3. Penyampaian, pengawasan, dan pelaporan SPPT PBB tahun 2008
  - 6.4. Pekan panutan pembayaran PBB Kota Medan tahun 2008
  - 6.5. Pengoperasian dan pemeliharaan *On Line Payment System*
  - 6.6. Pemeriksaan wajib pajak daerah
  - 6.7. Penagihan tunggakan pajak daerah/retribusi daerah dan pajak bumi dan bangunan (PBB)
  - 6.8. Koordinasi data pajak penerangan jalan
  - 6.9. Pelaksanaan pendataan dan pendaftaran wajib pajak daerah
  - 6.10. Intensifikasi penerimaan PBB
  - 6.11. Pengoperasian informasi pendapatan daerah
  - 6.12. Pengawasan tiket bioskop dan hiburan insidentil
  - 6.13. Pembukuan dan verifikasi pajak daerah dan retribusi daerah
  - 6.14. Perhitungan dan eksaminasi penetapan SKP dan angsuran pajak daerah
  - 6.15. Verifikasi/pemeriksaan wajib pajak daerah
  - 6.16. Himbauan/pemanggilan pembayaran dan pengadministrasian PBB
  - 6.17. Intensifikasi dan Ekstensifikasi penerimaan BPHTB
  - 6.18. Monitoring potensi penerimaan daerah
  - 6.19. Penatausahaan penerimaan retribusi dan pendapatan lain-lain
  - 6.20. Penyerahan dan rapat evaluasi penyampaian SPPT PBB tahun 2008

6.21. Rapat evaluasi penerimaan PBB dan BPHTB tahun 2008 dan penyusunan program penerimaan PBB dan BPHTB tahun 2009

6.22. Pertemuan Pemerintah Kota Medan dengan WP PBB potensial di Kota Medan

7) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

7.1. Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparaturnya

7.2. Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja

8) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

8.1. Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik

9) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

9.1. Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan

9.2. Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan

9.3. Publikasi peraturan perundang-undangan

#### **b. Pencapaian Program dan Kegiatan**

Pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran urusan wajib pemerintahan di bidang pendapatan daerah selama tahun 2008 menghasilkan keluaran (output) sebagai berikut :

– Terdatanya Wajib Pajak Daerah sebanyak 1.529 WP untuk masing-masing jenis pajak sebagai berikut :

Pajak Hotel : 149 WP

Pajak Restoran : 829 WP

Pajak Hiburan : 399 WP

Pajak Parkir : 54 WP

– Terkoreksinya Wajib Pajak yang belum membayar Pajak Daerah dengan benar sebanyak 582 WP.

- Tertagihnya Pajak Daerah dari Wajib Pajak yang menunggak sebesar :
  - Wajib Pajak Hotel : Rp 1.505.446.559,89
  - Wajib Pajak Restoran : Rp 320.612.104,84
  - Wajib Pajak Hiburan : Rp 192.803.035,71
  - Wajib Pajak Parkir : Rp 151.740.000,00
- Terawasinya penerimaan Pajak Hiburan atas peredaran karcis bioskop dan karcis Pajak Hiburan Insidentil sebesar  $\pm$  98%, sehingga realisasi penerimaan pajak hiburan dari Bioskop dan Insidentil dengan target sebesar Rp 2.893.033.000,- dan realisasi sebesar Rp. 3.492.804.000,- atau mencapai sekitar 120,73% sehingga terdapat over target sebesar Rp 599.771.000,-
- Terdistribusikannya SPPT PBB ke Wajib Pajak sebanyak 395.221 lembar SPPT dengan tepat waktu.
- Terealisasi penerimaan PBB sebesar Rp 30.923.379.608,- untuk 255 WP PBB sebelum tanggal jatuh tempo pada kegiatan pertemuan antara Pemko Medan dengan Wajib Pajak PBB Potensial.
- Terpeliharanya dan terawasinya perangkat Online Payment System PBB dan BPHTB selama 12 bulan untuk kelancaran dan kemudahan WP PBB membayar PBB dan BPHTB dan tersalurkannya pembayaran insentif kepada petugas/user online pada 44 bank TP.
- Terealisasinya penerimaan BPHTB sebesar Rp 99.600.885.969,- dari target yang sudah ditetapkan sebesar Rp 50.000.000.000,- pada tahun 2008.
- Terevaluasinya penerimaan PBB dan BPHTB serta diketahuinya hambatan/kendala di lapangan serta mencari upaya penanggulangan masalah, hambatan, kendala yang dihadapi serta tersusunnya program penerimaan PBB Kota Medan Tahun 2008.

- Terlaksananya sosialisasi dalam bentuk pemasangan spanduk yang bertujuan untuk menginformasikan dan menghimbau masyarakat/Wajib Pajak untuk mengetahui dan membayar pajak tepat waktu dengan jumlah sebanyak 110 spanduk.

Dampak pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan pendapatan, khususnya dalam meningkatkan penerimaan PAD Kota Medan sebagai berikut :

- Terealisasinya PAD tahun 2008 sebesar Rp 390.884.698.213,44 atau 109,76 %.
- Terealisasinya lebih dari 100 % penerimaan PAD yang dikelola Dinas Pendapatan Kota Medan dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Target 2008	Realisasi 2008	%
1. Pajak Hotel	20.455.233.700,00	24.868.313.036,86	121,57
2. Pajak Restoran	40.523.931.000,00	43.030.223.537,34	106,18
3. Pajak Hiburan	8.921.700.000,00	9.396.450.219,23	105,32
4. Pajak Penerangan Jalan	112.863.905.000,00	113.584.356.914,00	100,64
5. Pajak Parkir	3.888.517.500,00	4.285.945.770,00	110,22
6. PBB	132.283.630.000,00	134.685.274.798,00	101,82
7. BPHTB	50.000.000.000,00	99.600.885.969,00	199,20

- Meningkatnya jumlah realisasi PBB tahun 2008 sebesar Rp 4.751.077.715,- dari tahun 2007.
- Terpeliharanya dan berfungsinya perangkat komputer pembayaran Online Payment System PBB selama 1 tahun sehingga dapat melayani masyarakat/Wajib Pajak dengan memberikan kemudahan dalam membayar PBB dan BPHTB di tempat-tempat Bank TP dan pada Notaris/PPAT di Kota Medan.
- Terdatanya kondisi/potensi pajak daerah untuk tahun 2008 sebagai berikut :

Pajak Hotel : Rp 20.455.233.700,-  
Pajak Restoran : Rp 40.523.931.000,-

Pajak Hiburan	: Rp	8.921.700.000,-
Pajak Parkir	: Rp	3.888.517.500,-
Pajak Pen. Jalan	: Rp	112.863.905.000,-

**c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara**

Secara kelembagaan, penyelenggaraan urusan pendapatan menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Kota Medan dengan mengembangkan koordinasi kepada SKPD terkait.

**d. Profil Kepegawaian**

Pegawai Dinas Pendapatan Kota Medan seluruhnya berjumlah 315 orang yaitu terdiri dari 234 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 81 orang Pegawai Harian Lepas (PHL) yang tersebar di seluruh sub unit organisasi. Berdasarkan Golongan, yang paling banyak jumlahnya adalah golongan III dan II yaitu sebanyak 74,78% dan 21,36%.

**Komposisi Pegawai**

**Dinas Pendapatan Kota Medan Menurut Golongan**

No.	Golongan	Jumlah (orang)	%
1.	IV	9	3,84
2.	III	175	74,78
3.	II	50	21,36
4.	I	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>234</b>	<b>100</b>

Menurut tingkat pendidikan, pegawai pada Dinas Pendapatan didominasi tamatan Sarjana (S1) sebanyak 50,85% dan SLTA sebanyak 38,88%.

**Komposisi Pegawai Dinas Pendapatan Kota Medan  
Menurut Tingkat Pendidikan Formal**

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah (orang)	%
1.	S-2	11	4,70
2.	S-1	119	50,85
3.	Sarjana Muda/Diploma	10	4,27
4.	SLTA	91	38,88
5.	SLTP	3	1,28
6.	SD	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>234</b>	<b>100</b>

Berdasarkan data di atas, diketahui komposisi jumlah pegawai Dinas Pendapatan cukup memadai, namun dari sisi kompetensi pegawai di bidang akuntansi/S1 masih belum mencukupi.

**e. Alokasi dan Realisasi Anggaran**

Pelaksanaan program dan kegiatan untuk urusan pendapatan selama tahun 2008 didukung oleh alokasi anggaran belanja sebesar Rp. 40.665.846.102,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 32.581.998.102,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 8.083.848.000,- dengan realisasi per 31 Desember 2008 sebesar Rp 35.025.757.732,27 atau terjadi selisih sekitar Rp. 5.640.088.369,73

**f. Proses Perencanaan Pembangunan**

Siklus perencanaan pembangunan urusan pendapatan pada dasarnya melalui beberapa tahapan pokok, yaitu :

- (a). Penyusunan rancangan awal (Rancangan Renja-SKPD)
- (b). Pelaksanaan Forum SKPD/Gabungan SKPD dan Musrenbang
- (c). Penetapan Renja – SKPD

Perencanaan pembangunan urusan pendapatan dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

**g. Kondisi Sarana dan Prasarana Kerja**

Sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pada Dinas Pendapatan berupa fasilitas gedung kantor serta kendaraan, komputer, dan peralatan kantor lainnya.

**Sarana Operasional Pegawai Dinas Pendapatan  
Kota Medan Tahun 2008**

No	Prasarana	Unit
1.	Kendaraan Roda 4	4
2.	Roda 2	9
3.	Perangkat Komputer Online PBB dan BPHTB	
	- Jaringan VPN-IP	5
	- Bank TP	44
	- Jaringan Telepon dan Speedy	95

**h. Permasalahan dan Solusi**

Untuk memberhasilkan penyelenggaraan otonomi daerah maka daerah diberi keleluasaan, kebijakan maupun strategi dalam memberdayakan dan memandirikan daerahnya. Hal ini tentunya tidak terlepas dari aspek keuangan (pendapatan) dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan masih terdapat beberapa kendala, yaitu :

1. Belum tersedianya pusat informasi yang up to date tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah.
2. Masih kurangnya peran aktif aparat pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menegakkan dan melaksanakan ketentuan peraturan yang berlaku.
3. Tingkat kesadaran para Wajib Pajak belum optimal.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka ditempuh upaya-upaya dengan cara :

- a. Menetapkan estimasi persentase (%) penerimaan PAD perbulan dan pertriwulan.
- b. Menegakkan komitmen bersama dan konsisten dalam setiap pelaksanaan keputusan dan tindakan.
- c. Memelihara dan mengelola data-data yang berguna untuk perencanaan, pelaporan, pelaksanaan tugas, monitoring dan evaluasi.
- d. Penegakan disiplin pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- e. Penegakan sanksi hukum yang jelas sesuai peraturan yang berlaku.

## **5. Balitbang**

Dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah di bidang penelitian dan pengembangan, secara kelembagaan dikelola Badan Penelitian Dan Pengembangan

### **a. Program dan Kegiatan**

Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan melaksanakan arah kebijakan umum di bidang penelitian dan pengembangan yang dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan dalam tahun 2008 sebagai berikut :

#### 1) Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran

- 1.1. Penyediaan jasa kebersihan kantor
- 1.2. Penyediaan alat tulis kantor
- 1.3. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- 1.4. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- 1.5. Penyediaan makanan dan minuman
- 1.6. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
- 1.7. Penyediaan jasa tenaga pendukung adminstrasi/ teknis perkantoran.

- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  - 2.1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
  - 2.2. Pengadaan peralatan gedung kantor
  - 2.3. Pengadaan mebeleur
  - 2.4. Pengadaan komputer dan perlengkapannya
  - 2.5. Pengadaan peralatan studio
  - 2.6. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
  - 3.1. Pendidikan dan pelatihan formal
- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
  - 4.1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
  - 4.2. Penyusunan rencana kerja SKPD
- 5) Program Pengembangan Data/Informasi
  - 5.1. Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan.
- 6) Program meningkatkan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
  - 6.1. Penelitian dan pendataan sumber-sumber PAD Kota Medan
- 7) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
  - 7.1. Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan
  - 7.2. Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan

## 8) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

### 8.1. Publikasi peraturan perundang-undangan

#### **b. Pencapaian Program dan Kegiatan**

Pelaksanaan program dan kegiatan urusan penelitian dan pengembangan selama tahun 2008, mengacu pada RKA-SKPD/DPA-SKPD yang ditetapkan serta prinsip-prinsip daya guna dan hasil guna dari implementasi pelaksanaannya, sekaligus pertimbangan kemampuan keuangan daerah. Implementasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran belanja langsung SKPD urusan penelitian dan pengembangan, menghasilkan keluaran (output) sebagai berikut :

#### 1. Program pelayanan administrasi perkantoran

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan ini menghasilkan keluaran (output) pokok antara lain :

- Tersedianya peralatan kebersihan kantor. Alat-alat kebersihan dibutuhkan dalam rangka menjaga suasana kantor yang bersih sehingga mendukung suasana kerja yang nyaman.
- Tersedianya ATK. ATK dibutuhkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan pelaksanaan administrasi kantor selama tahun 2008.
- Tersedianya cetakan dan pengadaan. Barang cetakan dan pengadaan ini dimaksudkan untuk mendukung penyelenggaraan pelaksanaan administrasi kantor selama tahun 2008, sekaligus penyelenggaraan tugas-tugas pokok dan fungsi SKPD pada urusan penelitian dan Pengembangan.
- Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan. Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diperlukan untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan/wawasan bagi personel Balitbang khususnya maupun pihak lain yang membutuhkan .

- Tersedianya minuman dan makanan rapat. Makan dan minum diperlukan untuk mendukung kegiatan rapat yang diselenggarakan oleh BALITBANG.
- Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan rapat koordinasi nasional. Melalui rapat-rapat koordinasi ini maka akan terjalin koordinasi yang semakin meningkat antara Balitbang Kota Medan dengan instansi terkait maupun dengan Balitbang Depdagri.
- Tersedianya jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran. Jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balitbang selama tahun 2008.

## 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Tersedianya perlengkapan gedung kantor. Pelengkapan gedung kantor diperlukan sebagai tambahan sarana dan prasarana aparatur kantor pada SKPD Balitbang Kota Medan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
- Tersedianya peralatan gedung kantor. Peralatan gedung kantor diperlukan agar tercapai suasana kantor yang nyaman guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balitbang Kota Medan yang semakin maksimal.
- Tersedianya Mebeleur. Perlengkapan mebeleur yang berupa meja, kursi kera dan rak buku sangat diperlukan bagi terlaksananya tugas pokok dan fungsi Balitbang Kota Medan yang semakin maksimal.
- Tersedianya komputer dan perlengkapannya. Komputer dan perlengkapannya merupakan tambahan peralatan kantor yang sangat dibutuhkan untuk meningkatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balitbang Kota Medan.

- Tersedianya peralatan studio, berupa proyektor multimedia dan kamera, alat-alat ini diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balitbang Kota Medan.
- Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor, sehingga mendukung suasana kerja yang nyaman sekaligus memperpanjang usia sarana dan prasarana kantor.

### 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- Terselenggaranya pelatihan bagi aparatur Balibang Kota Medan. Pelatihan ini dimaksudkan untuk menambah/meningkatkan wawasan dan kompetensi aparatur Balitbang Kota Medan

### 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD berupa LAKIP Balitbang Kota Medan 2007. Dalam LAKIP ini dikemukakan adanya keberhasilan maupun kekurangan yang akan menjadi bahan renja, selanjutnya.
- Tersusunnya Rencana Kerja Anggaran (RKA) Balibang Kota Medan tahun 2008. RKA dibutuhkan berkaitan dengan peningkatan kinerja SKPD. RKA dalam proses penyusunan telah mengakomodir masukan-masukan dari masing-masing bidang yang ada di Balitbang

### 5. Program Pengembangan Data /Informasi

- Tersedianya Data/Informasi untuk perencanaan kota. Data/informasi ini diperoleh melalui pelaksanaan simposium manajemen perkotaan yang telah terselenggara pada bulan November 2008.

6. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

- Meningkatnya mutu tenaga pendidik di kota Medan yang dihasilkan melalui kegiatan pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan (Kajian Jarlitbang terhadap peningkatan mutu pendidikan dasar di kota Medan).
- Terdatanya lokasi sekolah tingkat pendidikan dasar di Kota Medan. Melalui kegiatan pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan.

7. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

- Terselenggaranya kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan Baitbang Kota Medan. Melalui kegiatan ini diharapkan institusi-institusi di jajaran Pemerintah Kota Medan dan pihak-pihak terkait semakin mamahami keberadaan Balitbang serta tugas pokok dan fungsinya.

Pelaksanaan program/kegiatan penelitian dan pengembangan selama tahun 2008 menghasilkan manfaat dan dampak yaitu :

1. Tersedianya kajian jaringan penelitian dan pengembangan terhadap peningkatan mutu pendidikan dasar di Kota Medan.
2. Hasil kajian Jarlit Litbang ini menjadi bahan perumusan dan penetapan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kota Medan dalam bidang pendidikan dasar.
3. Meningkatkan stimulus animo SDM aparatur Pemko Medan dalam mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang penelitian pengembangan, sehingga ke depan akan tercipta tenaga fungsional peneliti yang handal dan berkualitas yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Medan.

**c. SKPD Penyelenggara**

Tugas Pokok Balitbang Kota Medan mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan dalam rangka perumusan dan penetapan kebijakan pemerintah daerah.

**d. Profil SDM Aparatur**

Badan penelitian dan Pengembangan mempunyai SDM aparatur sebanyak 44 orang yang terdiri dari Kepala Badan (eselon II/b). Sekretaris (eselon III/a) yang membawahi 4 (empat) orang Kasubbag (eselon IV/b).

Kepala bidang (eselon III/ a) berjumlah 4 orang, masing-masing Kepala bidang membawahi 2 (dua) Ka.Sub Bidang (eselon IV/b) sehingga jumlah Ka.Sub Bidang secara keseluruhan ada 8 (delapan) orang. Namun untuk jabatan fungsional peneliti, di Balitbang Kota Medan masih kosong. Di harapkan ditahun 2009, dengan pelaksanaan PP 41 Tahun 2007 akan terbuka peluang bagi PNS yang mau dan memenuhi persyaratan untuk menjadi tengaga fungsional peneliti di Balitbang Kota Medan. Profil SDM aparatur Balitbang Kota Medan dapat disajikan sebagai berikut :

Pegawai Negeri Sipil dilihat dari Jumlah dan Kualitas Pendidikan:

No.	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah	%
1	SD	-	0
2	SMP/MI	-	0
3	SMA/SMK/MA	3	0,7
4	S1	37	0,84
5	S2	4	0,09
6	S3	-	0
<b>Jumlah</b>		44	100

Pegawai Negeri Sipil dilihat dari Pangkat dan Golongan:

No.	Pangkat/Golongan	Jumlah	%
1	IV/c	1	0,02
2	IV/b	7	0,16
3	IV/a	13	0,3
4	III/d	15	0,34
5	III/c	3	0,7
6	III/b	1	0,2
7	III/a	1	0,2
8	II/d	-	-
9	II/c	2	0,05
10	II/b	1	0,02
11	II/a	-	
<b>Jumlah</b>		44	100

**e. Alokasi dan Realisasi Anggaran**

Dalam rangka pelaksanaan urusan penelitian dan pengembangan selama tahun 2008 SKPD di dukung oleh alokasi anggaran belanja daerah sebesar Rp. 2.710.635.938,-. Dengan langsung Rp 637.032.000,- dan belanja tidak langsung Rp 2.073.603.938,- atau sama dengan 0,54% dari total belanja APBD TA. 2008

Sebagai bentuk akuntabilitas maka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah di tingkat SKPD disampaikan masih dalam bentuk laporan realisasi fisik dan keuangan SKPD pada akhir tahun anggaran

**f. Proses Perencanaan Pembangunan**

Sebagai bagian dari management pembangunan maka penyelenggaraan urusan penelitian dan pengembangan selama tahun 2008 mengacu kepada beberapa dokumen pokok perencanaan seperti :

- Renstra SKPD
- Renja SKPD
- RKA SKPD

Pengelolaan belanja SKPD tetap mengacu pada prinsip-prinsip daya guna dan hasil guna dari implementasi pelaksanaannya sekaligus kemampuan keuangan daerah. Program-program yang dilaksanakan juga diupayakan memiliki sinkronisasi yang kuat dengan program-program RKPD yang ditetapkan dalam tahun 2008.

**g. Kondisi Sarana dan Prasarana**

Sarana dan Prasarana sebagai pendukung tugas pokok dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan, yaitu :

- Tersedianya perlengkapan gedung kantor
- Tersedianya peralatan gedung kantor
- Tersedianya mebeleur
- Tersedianya komputer dan perlengkapannya
- Tersedianya peralatan studio dan
- Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor sehingga akan mendukung suasana kerja yang nyaman dan akan memperpanjang usia sarana dan prasarana kantor.

**h. Permasalahan dan Solusi**

Beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Penelitian dan pengembangan masih dipandang sebagai kinerja yang "tidak sepenuhnya penting" dalam lingkungan yang lebih luas.
2. Keterbatasan dana untuk melakukan penelitian dan pengembangan terutama bila ditinjau dari upaya pencapaian hasil litbang yang berkualitas.
3. Sumber daya aparatur yang ada di Balitbang Kota Medan masih terbatas kemampuan dalam hal penelitian, terutama belum ada tenaga fungsional peneliti.
4. Masih sangat terbatasnya sarana dan prasarana pendukung penelitian yang berkualitas.

5. Data base dan informasi yang akurat sebagai bahan penelitian dan pengembangan masih belum memadai.
6. Belum adanya peralatan dan tenaga penelitian yang handal dibidang sumber daya alam berupa sumber daya mineral dan energi, kehutanan dan kelautan.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, solusi yang perlu ditempuh antara lain :

1. Peningkatan dana untuk meningkatkan kualitas penelitian sehingga rekomendasi untuk bahan kebijakan Pemko Medan akan lebih berkualitas dan dapat diterapkan.
2. Mensosialisasikan fungsi dan peran Balitbang selain membentuk forum penelitian dan pengembangan.
3. Mengirimkan pegawai Balitbang ke berbagai diklat, seminar, simposium dan diskusi berbagai event dan kegiatan.
4. Mengupayakan adanya tenaga ahli penelitan bersertifikat.
5. Mewujudkan jabatan fungsional peneliti di Balitbang Kota Medan.
6. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana/prasarana pendukung penelitian.

## **6. Fungsi Pengawasan**

Sebagai bagian dari urusan pemerintahan umum, maka fungsi pengawasan merupakan salah satu sub urusan pemerintahan umum yang diselenggarakan Pemerintah Kota Medan selama Tahun 2008.

### **a. Program dan Kegiatan.**

Secara kongkrit dan operasional, arah kebijakan umum pembangunan kota di bidang pengawasan dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan pokok selama tahun 2008 sebagai berikut :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - 1.1. Penyediaan alat tulis kantor

- 1.2. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- 1.3. Penyediaan makanan dan minuman
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  - 2.1. Pengadaan peralatan gedung kantor
  - 2.2. Pengadaan meubeler
  - 2.3. Pengadaan komputer dan perlengkapannya
  - 2.4. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
- 3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
  - 3.1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
  - 3.2. Penyusunan rencana kerja SKPD
- 4) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.
  - 4.1. Penyusunan Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Kepala Daerah
- 5) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.
  - 5.1. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala
  - 5.2. Pengadaan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah
  - 5.3. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
  - 5.4. Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif.
  - 5.5. Reviu atas laporan keuangan Pemerintah Daerah
  - 5.6. Evaluasi laporan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah (LAKIP) SKPD
  - 5.7. Pendataan, penyampaian dan monitoring LP2P

6) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.

1.1. Pelatihan dan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparaturnya

1.2. Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja

#### **b. Pencapaian Program dan Kegiatan**

Pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran selama tahun 2008 menghasilkan output (keluaran) sebagai berikut :

##### 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan ini menghasilkan output (keluaran) pokok antara lain :

- Tersedianya alat tulis kantor pada Inspektorat Kota Medan. ATK ini dibutuhkan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pelayanan administrasi kantor selama tahun 2008.
- Tersedianya barang cetakan umum pada Inspektorat Kota Medan. Cetakan ini dimaksudkan untuk mendukung tersedianya formulir bendaharawan, amplop, kop surat, dll, untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan administrasi kantor selama tahun 2008.
- Tersedianya makanan dan minuman rapat staf pada Inspektorat Kota Medan.

##### 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Realisasi program dan kegiatan ini menghasilkan keluaran pokok antara lain :

- Tersedianya peralatan gedung kantor.  
Peralatan gedung kantor dimaksud berupa AC.
- Tersedianya Meubel.  
Meubelair dimaksud berupa kursi pegawai.
- Tersedianya computer dan perlengkapannya.  
Computer laptop dan computer personal.

- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.
3. Program Peningkatan Pengembangan System Capaian Kinerja dan Keuangan.  
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan ini menghasilkan keluaran pokok yaitu :
- Tersedianya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kota Medan Tahun 2007.
  - Tersedianya Renja Inspektorat Kota Medan Tahun 2009.
4. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.  
Realisasi program dan kegiatan ini menghasilkan keluaran pokok antara lain :
- Tersedianya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pemko Medan Tahun 2007.
5. Program Peningkatan System Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.  
Realisasi program dan kegiatan ini menghasilkan keluaran pokok antara lain :
- Terlaksananya pemeriksaan rutin di lingkungan Pemko Medan.
  - Terlaksananya pemeriksaan khusus di lingkungan Pemko Medan.
  - Terlaksananya pelaksanaan tindak lanjut temuan pengawasan.
  - Terlaksananya pengawasan yang lebih komprehensif.
  - Terlaksananya review atas laporan keuangan Pemko Medan.
  - Terlaksananya evaluasi LAKIP SKPD.
  - Terlaksananya pendataan, penyampaian Wajib LP2P.

6. Program Peningkatan System Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.

Realisasi program dan kegiatan ini menghasilkan keluaran pokok antara lain :

- Terlaksananya pemeriksaan rutin dilingkungan Pemko Medan.

Penyelenggaraan fungsi pengawasan selama tahun 2008 menghasilkan manfaat dan dampak antara lain :

- Semakin membaiknya peran pengawasan internal pada Pemko Medan.
- Meningkatnya disiplin pelaksanaan program-program pembangunan kota yang bersumber dari keuangan daerah.

**c. SKPD Penyelenggara**

1. Tugas Pokok Inspektorat Kota Medan.

Tugas Pokok Inspektorat Kota Medan adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah

2. Fungsi Inspektorat Kota Medan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Inspektorat Kota Medan mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan program pengawasan;
- b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan
- c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

**d. Profil SDM Aparatur**

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pengawas Kota Medan didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 49 (empat puluh sembilan) orang yang terdiri atas :

- Pejabat Struktural	=	30	Orang
- Pejabat Fungsional/ JFA	=	0	Orang
- Tenaga Administrasi	=	<u>19</u>	<u>Orang</u>
<b>Jumlah</b>	=	<b>49</b>	<b>Orang</b>

Komposisi sumber daya manusia tersebut berdasarkan Strata Pendidikan, Fungsional, Jabatan dan Golongan, yaitu :

– Menurut Strata Pendidikan :

– S2	=	6	Orang
– SI	=	30	Orang
– Diploma-III	=	3	Orang
– SLTA	=	7	Orang
– SLTP	=	1	Orang
– SD	=	<u>2</u>	<u>Orang</u>
<b>Jumlah</b>	<b>=</b>	<b>49</b>	<b>Orang</b>

– Menurut Jabatan :

– Kepala Badan	=	1	Orang
– Sekretaris	=	1	Orang
– Kepala Bidang	=	6	Orang
– Kepala Sub Bagian	=	4	Orang
– Kepala Sub Bidang	=	<u>18</u>	<u>Orang</u>
<b>Jumlah</b>	<b>=</b>	<b>30</b>	<b>Orang</b>

– Menurut Fungsional :

– Fungsional	=	-	Orang
– Administrasi	=	<u>22</u>	<u>Orang</u>
<b>Jumlah</b>	<b>=</b>	<b>22</b>	<b>Orang</b>

#### e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Inspektorat Kota Medan Tahun 2008 per 31 Desember 2008 adalah Rp.3.307.790.717,-. dari jumlah anggaran Rp. 3.947.390.812,- atau 83,80%.

Sedangkan realisasi anggaran Inspektorat Kota Medan Tahun 2007 per 31 Desember 2007 sebesar Rp. 1.065.410.000. dari jumlah anggaran Rp.1.421.200.000. atau 74,97 %.

#### f. Proses Perencanaan Pembangunan

Siklus perencanaan pembangunan urusan pengawasan pada dasarnya melalui beberapa tahapan pokok yaitu :

1. Penyusunan Rencana awal (Rancangan Renja SKPD).
2. Pelaksanaan forum SKPD/gabungan SKPD dan Musrenbang.
3. Penetapan Renja SKPD.

Perencanaan pembangunan urusan pengawasan dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

Di samping itu, perencanaan pembangunan urusan pengawasan juga mengacu kepada RPJM Kota Medan tahun 2006 – 2010 dan Renstra Inspektorat Kota Medan tahun 2006 – 2010.

Selanjutnya untuk mengoptimalkan perencanaan yang dilakukan, terus ditingkatkan keterpaduan kebijakan, program, kegiatan dan penganggarannya dengan pemerintah tingkat atasan.

**g. Kondisi Prasarana dan Sarana**

Sarana operasional adalah alat yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas, sesuai dengan spesifikasi tugas Inspektorat Kota Medan. Untuk lebih jelasnya, sarana dan prasarana sebagai pendukung tugas operasional Inspektorat Kota Medan dapat dilihat dalam tabel berikut :

Jumlah dan Jenis Sarana dan Prasarana pada Badan  
Pengawasan Daerah Kota Medan

No	Prasarana	Unit
1	2	3
1.	Kendaraan roda empat	4 unit
2.	Kendaraan roda dua	6 unit
3.	Mesin tik	11 buah
4.	Filling cabinet	22 buah
5.	Komputer	7 unit
6.	AC	10 unit
7.	Printer HP	1 buah

**h. Permasalahan dan Solusi**

Secara umum permasalahan yang dihadapi Inspektorat Kota Medan adalah sebagai berikut :

- a. Kualitas SDM yang masih relatif rendah.
- b. Terbatasnya anggaran untuk operasional pemeriksaan maupun untuk peningkatan kualitas SDM.
- c. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan operasional pemeriksaan.
- d. Masih adanya anggapan bahwa Inspektorat bukan merupakan mitra dari SKPD

Tindak lanjut sebagai solusi permasalahan.

- a. Meningkatkan kualitas SDM melalui :
  - Pendidikan dan pelatihan.
  - Menciptakan perpustakaan yang berisi peraturan-peraturan kedinasan.
- b. Mengupayakan peningkatan anggaran yang lebih memadai.
- c. Melengkapi sarana kantor dan sarana operasional pemeriksaan.

- d. Melakukan sosialisasi langsung ataupun tidak langsung kepada SKPD tentang manfaat hasil pemeriksaan sebagai peningkatan kinerja.

## **7. Kepegawaian**

Dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah di bidang kepegawaian, secara kelembagaan dikelola oleh Badan kepegawaian, dengan program dan kegiatan pokok, sebagai berikut :

### **a. Program dan Kegiatan**

Secara konkrit dan operasional, arah kebijakan umum pembangunan kota di bidang kepegawaian dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan pokok selama tahun 2008 sebagai berikut :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - 1.1. Penyediaan jasa administrasi keuangan
  - 1.2. Penyediaan alat tulis kantor
  - 1.3. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
  - 1.4. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  - 2.1. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
  - 3.1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
- 4) Program Fasilitasi Pindah / Purna Tugas PNS
  - 4.1. Fasilitasi proses purna tugas PNS
  - 4.2. Pembinaan penghargaan PNS yang pensiun/ purna tugas

- 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
  - 5.1. Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
  - 5.2. Penyusunan rencana Kerja SKPD.
  
- 6) Program Pendidikan Kedinasan
  - 6.1. Pendidikan penjenjangan struktural
  
- 7) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
  - 7.1. Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi CPNS daerah.
  - 7.2. Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah.
  - 7.3. Penataan kelembagaan perangkat daerah Kota Medan.
  - 7.4. Penyusunan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat Daerah.
  - 7.5. Penyusunan standar pelayanan pada BKD Kota Medan.
  - 7.6. Bimbingan persiapan ujian dinas pelaksanaan ujian sertifikasi keahlian barang/ jasa Pemerintah.
  
- 8) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
  - 8.1. Penyusunan rencana pembinaan karir PNS.
  - 8.2. Penempatan PNS.
  - 8.3. Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS.
  - 8.4. Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah.
  - 8.5. Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berprestasi.
  - 8.6. Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS.
  - 8.7. Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas.
  - 8.8. Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan.

- 8.9. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
  - 8.10. Proses pemberkasan pengangkatan pegawai.
  - 8.11. Pembinaan solidaritas PNS.
  - 8.12. Penyelenggaraan ujian kenaikan pangkat untuk penyesuaian Ijazah.
  - 8.13. Inpassing PNS.
  - 8.14. Kajian formasi jabatan fungsional.
  - 8.15. Bimbingan teknis penerapan peraturan Walikota Medan No.860.K tentang pendelegasian wewenang penjatuhan hukuman disiplin.
  - 8.16. Penyusunan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kota Medan
  - 8.17. Penyelenggaraan seleksi calon praja IPDN
- 9) Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah
    - 9.1. Pendataan dan penataan dokumen /arsip daerah.
  - 10) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
    - 10.1. Workshop pengelolaan keuangan daerah bagi kepala SKPD.
    - 10.2. Kursus singkat akuntansi keuangan daerah.
    - 10.3. Bimbingan teknis penata usahaan keuangan daerah.
    - 10.4. Pendidikan dan pelatihan manajemen asset daerah.

**b. Pencapaian Program dan Kegiatan**

Pelaksanaan, program kegiatan dan anggaran urusan kepegawaian selama tahun 2008 menghasilkan output (keluaran) sebagai berikut :

- 1. Terlaksananya pengadaan barang/jasa pemeriksa barang untuk tahun 2008. Kegiatan ini diarahkan untuk mendukung proses pengadaan barang/jasa yang transparan dan akuntabel.

2. Tersedianya alat tulis kantor pada BKD Kota Medan. ATK ini dibutuhkan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pelayanan administrasi kantor selama tahun 2008.
3. Tersedianya barang cetakan dan penggandaan dokumen pada BKD Kota Medan. Cetakan dan penggandaan ini dimaksudkan untuk mendukung tersedianya berupa formulir SK kenaikan gaji berkala, DP3, amplop BKD, Kop Surat BKD dll untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan administrasi kantor selama tahun 2008 pada BKD Kota Medan.
4. Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor BKD Kota Medan. Peralatan dan perlengkapan kantor ini terdiri dari 1 buah Brand kas dan 1 buah komputer, tujuannya adalah untuk keamanan penyimpanan uang BKD dan kelancaran tugas-tugas administrasi kantor.
5. Terawatnya peralatan kantor. Perawatan ini dimaksudkan untuk merawat alat kantor berupa komputer, mesin tik, AC dan lain-lain.
6. Tersedianya pakaian dinas dan perlengkapannya. Pakaian dinas ini dimaksudkan untuk pakaian seragam pegawai dalam rangka meningkatkan disiplin PNS pada BKD Kota Medan.
7. Terbitnya SK pensiun tepat waktu. SK pensiun tepat waktu bertujuan untuk menghindari keterlambatan pengamprahan gaji pensiun.
8. Tersusunnya laporan capaian kinerja BKD Kota Medan tahun 2007. Tujuannya adalah bahan evaluasi dan sumber data serta informasi untuk kegiatan tahun berikutnya.
9. Tersusunnya rencana kerja BKD Kota Medan untuk tahun 2009. Renja ini bertujuan untuk pedoman pelaksanaan kegiatan dan besaran dana yang dibutuhkan, dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kegiatan yang sudah dilaksanakan

10. Meningkatnya kompetensi manajerial PNS untuk bahan pertimbangan dalam pengembangan karir.
11. Meningkatnya kompetensi CPNS terhadap tugas dan fungsi sebagai aparatur pemerintah, dengan tujuan menjadi salah satu syarat untuk diangkat menjadi PNS.
12. Meningkatnya kompetensi PNS dalam bidang proses pengadaan barang/jasa, dengan tujuan mendidik PNS di bidang pengadaan barang/jasa sesuai dengan Keppres Nomor 80 tahun 2003.
13. Tersusunnya draft rancangan peraturan daerah tentang organisasi perangkat daerah, dengan tujuan untuk bahan masukan dan pertimbangan bagi pimpinan dalam membuat kebijakan di bidang struktur organisasi perangkat daerah Kota Medan.
14. Meningkatnya kompetensi PNS dalam proses pengadaan barang/jasa sekaligus bertambahnya PNS yang memiliki sertifikasi sebagai salah satu syarat untuk diangkat menjadi pejabat pengadaan barang/jasa.
15. Tersedianya rekomendasi pertimbangan pengangkatan pejabat untuk menduduki jabatan. Tujuannya agar para PNS yang akan diangkat untuk menduduki jabatan pada SKPD di jajaran Pemerintah Kota Medan, sesuai dengan kompetensi, dan objektifit serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
16. Terlaksananya pelantikan pejabat struktural. Kegiatan ini dimaksudkan untuk melantik pejabat yang akan mengisi jabatan tertentu.
17. Tersedianya SK kenaikan pangkat dengan tujuan terbitnya SK kenaikan pangkat PNS Pemko Medan bagi yang sudah memenuhi syarat tepat waktu.
18. Tersedianya data kepegawaian yang akurat, dengan tujuan meningkatkan pelayanan administrasi bagi PNS Pemko Medan melalui sistem komputerisasi.

19. Pemberian penganugerahan penghargaan kepada PNS yang memenuhi syarat guna memotivasi peningkatan prestasi dan kinerja pegawai.
20. Tersedianya kajian pertimbangan tentang pelanggaran disiplin oleh PNS untuk direkomendasikan kepada pimpinan dengan tujuan penegakan disiplin dan peraturan kepegawaian kepada PNS di lingkungan Pemko Medan.
21. Tersedianya pendidikan bagi PNS yang mengikuti tugas belajar ikatan dinas, tujuannya memberikan kesempatan kepada PNS meningkatkan kompetensi untuk mendukung pelaksanaan tugas kedinasan.
22. Meningkatnya kompetensi peserta diklat dalam tugas sesuai dengan bidangnya dengan tujuan memberikan pendidikan teknis yang menyangkut tugas kedinasan.
23. Terlaksananya monitoring dan evaluasi pembinaan kepegawaian di lingkungan Pemko Medan dengan tujuan untuk mendapatkan masukan tentang permasalahan dalam pelaksanaan tugas pada SKPD, sebagai bahan kajian untuk diteruskan kepada Pimpinan.
24. Terseleksinya berkas pegawai honorer yang akan diangkat menjadi CPNS. Tujuannya menyeleksi kelengkapan berkas para pegawai honorer untuk dikirim ke Jakarta sebagai syarat untuk diangkat menjadi CPNS.
25. Tersantuninya PNS, Istri/Suami dan anak PNS yang meninggal dunia, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan rasa solidaritas sesama PNS di lingkungan Pemko Medan.
26. Terselenggaranya ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah bagi PNS Golongan II Pemko Medan, tujuan kegiatan ini memberikan kesempatan kepada PNS gol II yang telah lulus S1 untuk menyesuaikan Ijazah.
27. Tersedianya SK penyesuaian kenaikan gaji bagi PNS. Tujuan dari kegiatan ini untuk pembuatan SK penyesuaian kenaikan gaji.

28. Tersusunnya draft kajian Peraturan Walikota Medan tentang jabatan fungsional pada SKPD, dengan tujuan mengetahui formasi jabatan fungsional pada SKPD untuk diterapkan dalam peraturan/Surat Keputusan Walikota Medan.
29. Tersusunnya draft rancangan peraturan daerah tentang pembagian urusan pemerintahan Pemko Medan. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan bahan pertimbangan kepada pimpinan tentang pembagian urusan pemerintahan.
30. Tertatanya arsip PNS Pemko Medan pada BKD Kota Medan. Tujuan kegiatan ini adalah untuk menata dan memelihara berkas PNS guna meningkatkan dan mempermudah pelayanan data kepada PNS.
31. Meningkatnya kompetensi PNS di bidang pengelolaan keuangan daerah, tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 dan Permendagri Nomor 59 tahun 2007.
32. Meningkatnya kompetensi PNS dalam pengelolaan keuangan daerah. Tujuannya untuk membimbing para pengelola keuangan daerah di bidang administrasi dan pembukuan.
33. Meningkatnya kompetensi PNS dalam pengelolaan keuangan Daerah, tujuannya mempersiapkan para bendaharawan, pejabat penatausahaan keuangan dan pejabat pelaksana teknis kegiatan dalam melaksanakan proses administrasi dan pembukuan sesuai dengan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 dan Permendagri Nomor 59 tahun 2007.
34. Meningkatnya kompetensi PNS dalam pengelolaan aset daerah, kegiatan ini bertujuan mempersiapkan aparatur yang menangani aset daerah sehingga dapat mendata,

memelihara dan membuat laporan tentang aset daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dampak pelaksanaan program dan kegiatan urusan kepegawaian selama tahun 2008 pada dasarnya terkait pada peningkatan kualitas sumber daya aparatur Pemerintah Kota Medan secara berkelanjutan sesuai kemampuan daerah. Untuk itu pembangunan bidang aparatur diarahkan untuk meningkatkan kompetensi baik manajerial maupun fungsional, meningkatkan pengelolaan kinerja sumber daya aparatur, pengembangan karir, sistem informasi kepegawaian dan meningkatkan pelayanan Pemerintah Kota Medan. Dampak utama pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang kepegawaian antara lain :

- a. Meningkatnya kompetensi aparatur diberbagai SKPD.
- b. Meningkatnya kompetensi manajerial PNS untuk eselon II.
- c. Meningkatnya motivasi PNS untuk meningkatkan karir.
- d. Terpenuhinya syarat kompetensi CPNS untuk diangkat menjadi PNS.
- e. Meningkatnya pendidikan formal PNS.

Dapat dijelaskan juga bahwa di samping kinerja program dan kegiatan sebagaimana yang telah disajikan, ada beberapa sub program/kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya, berdasarkan pertimbangan efisien dan efektivitas pelaksanaannya. Hal ini juga dimaksudkan untuk mendorong perwujudan akuntabilitas pembangunan kota selama tahun 2008.

**c. SKPD Penyelenggara**

Secara organisatoris, tugas dan fungsi kepegawaian menjadi tugas dan tanggung jawab Badan Kepegawaian Daerah Kota Medan, dengan mengembangkan koordinasi kepada SKPD antara lain :

1. Kantor Statistik Kota Medan.

Dalam hal kebutuhan data yang menyangkut aparaturnya daerah, BKD Kota Medan selalu bekerja sama dengan BPS untuk mendapatkan dan memproses data sesuai dengan kebutuhan kepegawaian.

2. Badan Diklat Propinsi Sumatera Utara.

Diklat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Medan umumnya melalui kerja sama dengan Badan Diklat Propinsi Sumatera Utara khususnya dalam hal pengadaan materi diklat, dosen dan sistem penyelenggaraan.

3. Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Sumatera Utara dan BKN Regional VI. Dalam hal urusan kenaikan pangkat golongan III BKD Kota Medan selalu mengadakan kerja sama dalam proses penerbitan pangkat Golongan III dan dilanjutkan proses ke BKN untuk Golongan IV.

**d. Profil SDM Aparatur**

Penyelenggaraan urusan kepegawaian selama tahun 2008 tidak terlepas dari kualitas SDM aparatur penyelenggara. SDM aparatur yang memiliki integritas dan kompetensi akan lebih banyak mempengaruhi daya guna dan hasil guna penyelenggara urusan kepegawaian yang selaras dengan harapan aparatur. Profil SDM aparatur Badan Kepegawaian Daerah Kota Medan dapat disajikan sebagai berikut :

Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jumlah dan Kualifikasi Pendidikan

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah (Orang)	%
1	SMA/SMK/MA	25	35,7
2	Sarjana Muda / Diploma	2	2,9
3	S1	38	54,2
4	S2	5	7,2
	<b>Jumlah</b>	70	100

Berdasarkan kualifikasi pendidikan, sebahagian besar PNS yang dimiliki Badan Kepegawaian Daerah Kota Medan berpendidikan S1 (54,2%) dan di urutan kedua berpendidikan SLTA (35,7%). Namun demikian potensi SDM aparatur tersebut belum sepenuhnya dapat mengisi kompetensi teknis yang dibutuhkan dalam Badan Kepegawaian. Hal ini dimungkinkan karena pembinaan karir PNS belum sepenuhnya didukung sistem karir dan prestasi kerja, selain hal tersebut masih terdapat kesenjangan antara latar belakang pendidikan, keahlian dan kecakapan kerja dengan tugas yang dikelola.

Pegawai Negeri Sipil PNS Berdasarkan Pangkat dan Golongan)

No.	Pangkat / Golongan	Jumlah (Orang)	%
1	II	23	32,9
2	III	39	55,7
3	IV	8	11,4
	<b>Jumlah</b>	70	100

Dari data tersebut di atas, PNS golongan III pada BKD Kota Medan menempati posisi jumlah tertinggi, hal ini menunjukkan bahwa gol III pada hakekatnya dilihat dari tugas pokok dan fungsi BKD Kota Medan sudah mencukupi akan tetapi golongan II yang berada pada peringkat II dipandang masih dibutuhkan.

**e. Alokasi dan Realisasi Anggaran**

Keterpaduan implementasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan Badan Kepegawaian selama tahun 2008 juga didukung oleh alokasi anggaran belanja daerah sebesar Rp. 8.240.315.858,- yang terdiri dari :

- Belanja tidak langsung Rp 3.061.965.858,-
- Belanja Langsung Rp. 5.178.350.000,-

dengan realisasi per 31 Desember 2008 sebesar Rp. 6.243.792.972. atau 75,77% yang terdiri dari :

- Belanja tidak langsung Rp. 2.890.321.972,-
- Belanja langsung Rp. 3.353.471.000,-

Adapun belanja langsung yang tidak terealisasi (tidak terpakai) adalah sebesar Rp. 5.178.350.000 – 3.353.471.000 = Rp. 1.824.279.000,- hal tersebut disebabkan beberapa kegiatan tidak terlaksana yaitu :

1. Pemberian penghargaan PNS yang pensiun/purna tugas.
2. Penyusunan tugas pokok dan fungsi SKPD.
3. Penyusunan standar pelayanan pada BKD Kota Medan.
4. Bintek penerapan peraturan Pemko Medan No. 860.K tentang pendelegasian wewenang penjatuhan hukuman disiplin.

#### **f. Proses Perencanaan Pembangunan**

Siklus perencanaan pembangunan urusan kepegawaian pada dasarnya melalui beberapa tahapan pokok yaitu :

1. Penyusunan Rencana awal (Rancangan Renja SKPD).
2. Pelaksanaan forum SKPD/gabungan SKPD dan Musrenbang.
3. Penetapan Renja SKPD.

Perencanaan pembangunan urusan kepegawaian dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

Di samping itu, perencanaan pembangunan urusan kepegawaian juga mengacu kepada RPJM Kota Medan tahun 2006–2010 dan Renstra BKD Kota Medan tahun 2006 – 2010.

Selanjutnya, untuk mengoptimalkan perencanaan yang dilakukan, terus ditingkatkan keterpaduan kebijakan, program, kegiatan dan penganggarnya dengan pemerintahan tingkat atasan.

**g. Kondisi Prasarana dan Sarana**

Sarana operasional adalah alat yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas, sesuai dengan spesifikasi tugas Badan Kepegawaian Daerah Kota Medan. Untuk lebih jelasnya, sarana dan prasarana sebagai pendukung tugas operasional BKD Kota Medan dapat dilihat dalam tabel berikut :

Jumlah dan Jenis Sarana dan Prasarana pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Medan

No	Prasarana	Unit
1.	Kendaraan roda empat	3 unit
2.	Kendaraan roda dua	4 unit
3.	Mesin tik	23 buah
4.	Meja biro	34 buah
5.	Meja ½ biro	50 buah
6.	Foto Copy	1 unit
7.	Alat komunikasi	13 buah
8.	Lemari kaca	8 buah
9.	Rak kayu	7 buah
10.	Lemari 2 pintu	4 buah
11.	Filling cabinet	33 buah
12.	Mesin tik elektronik	3 buah
13.	Kursi besi	76 buah
14.	Jam dinding	4 buah
15.	Papan data	4 buah
16.	Komputer	21 unit
17.	Kursi tamu	7 set
18.	AC	16 unit
19.	Kursi putar / penghadap	39 buah
20.	Ralpeg	3 buah
21.	Penghancur kertas	4 buah
22.	Meja komputer	12 buah
23.	Rak panjang	14 buah
24.	Rak besi	7 buah
25.	Kursi kayu	47 buah
26.	Lemari kaca	2 buah
27.	Printer HP	1 buah
28.	Lemari kendali	1 buah

29.	Proyektor	1 buah
30.	Server	1 unit
31.	UPS	1 unit
32.	Buku Perpustakaan	220 buah

#### **h. Permasalahan dan Solusi**

Secara umum permasalahan yang dihadapi Badan Kepegawaian Daerah Kota Medan sebagai berikut :

1. Pembinaan karir Pegawai Negeri Sipil belum sepenuhnya didukung sistem karir dan prestasi kerja.
2. Masih terdapat kesenjangan antara latar belakang pendidikan, keahlian, kecakapan dengan tugas / pekerjaan yang menjadi tanggung jawab aparatur.
3. Karena keterbatasan sarana dan prasarana, program Diklat masih tertuju kepada peningkatan kompetensi yang bersifat umum, oleh karena itu diklat yang dilaksanakan belum sepenuhnya berhasil mengurangi kesenjangan antara kompetensi yang dibutuhkan Jabatan/pekerjaan dengan yang dimiliki aparatur.
4. Insentif yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil belum memadai dibandingkan dengan kebutuhan hidup Pegawai Negeri Sipil.

Solusi tindak lanjut yang dijalankan, adalah, antara lain :

1. Mengembangkan pola pembinaan karir berdasarkan kompetensi dan prestasi kerja.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur melalui kegiatan Diklat Teknis dan Fungsional serta memberikan kesempatan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pendidikan formal.
3. Pengembangan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
4. Meningkatkan kesejahteraan dan memberikan Penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil yang berprestasi.